

**KONSEP PARTAI OPOSISI MENURUT PEMIKIR MUSLIM
(Membedah Pemikiran Nurcholish Madjid)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

AHMAD FAIZAL

NIM 112211011

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. Miftah AF, M.Ag
Jl. Kembang Jeruk III/31
Tlogosari Semarang

Dr. H. Mashudi, M.Ag
Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon
RT 5/1 Jeparu

Semarang, 24 Mei 2016

Nota pembimbing

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal. : Naskah Skripsi
a.n. Saudara Ahmad Faizal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

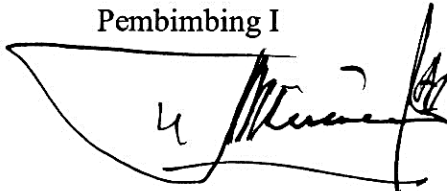
Nama : Ahmad Faizal
NIM : 112211011
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : "Konsep Partai Oposisi Menurut Pemikir Muslim (membedah pemikiran Nurcholish Madjid)".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

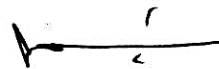
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Miftah AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M.Ag
Nip. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telpon/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Faizal
NIM : 112211011
Judul : **KONSEP PARTAI OPOSISI MENURUT PEMIKIR MUSLIM (membedah pemikiran Nurcholish Madjid)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 21 Juni 2016

Ketua Sidang,

Drs. H. Abu Hapsin, M.Ag, PhD.
Nip. 19590606 198903 1 002

Penguji I,

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I,

Drs. Miftah AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1 001

Sekretaris,

Drs. Miftah AF, M.Ag
Nip. 19530515 198403 1 001

Penguji II,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II,

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah dituliseleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Mei 2016



Ahmad Faizal

112211011

MOTTO

**POLITIK ADALAH SENI HALUS UNTUK MENDAPATKAN
SUARA DARI ORANG MISKIN DAN DANA KAMPANYE
DARI ORANG KAYA, DENGAN MENJAJIKAN
MELINDUNGI SATU DARI YANG LAIN.**

(Oscar Ameringer, penulis dan aktivis sosialis turunan Jerman di AS)

ABSTRAK

Partai oposisi merupakan dua kata yang masih negatif artinya dalam masyarakat Indonesia, sehingga partai yang kalah dalam pemilu seringkali enggan menyebut partainya sebagai partai oposisi. Hal ini dikarenakan sejarah bangsa Indonesia yang kelam. Nurcholish Madjid cendekiawan Muslim Indonesia menawarkan sebuah konsep oposisi yang lebih halus dan positif, namun dalam sejarah peradaban Islam juga terdapat aliran oposisi yang dapat menjadi landasan bagi partai oposisi di Indonesia. Lalu bagaimana konsep partai oposisi menurut Nurcholish Madjid jika di tinjau dari perspektif Islam, dan bagaimana kedudukan serta perannya dalam pemerintahan di Indonesia? Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana konsep oposisi yang di tawarkan Cak Nur jika di tinjau dari perspektif Islam dan bagaimana peran serta kedudukan partai oposisi di Indonesia.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data *liberary research*. data primernya yaitu buku *Dialog Keterbukaan, artikulasi nilai islam dalam wacana social politik kontemporer, Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*. Data sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung. Pengambilan kepustakaan didasarkan pada otoritas keunggulan pengarangnya dibidang masing-masing. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif. Dengan demikian penulis akan menggambarkan, atau memaparkan pendapat Nurcholish Madjid tentang konsep partai oposisi dan di analisis dengan buku yang sekiranya dapat menjawab analisis penulis nantinya.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa konsep partai oposisi menurut Nurcholish Madjid adalah *loyal oposition* atau dapat disebut sebagai partai yang mendukung pemerintah namun tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan berperan sebagai *check and balance* atau sebagai pengawas dan pengimbang dalam pemerintahan. Karena pada hakekatnya manusia itu tempatnya salah dan khilaf sehingga partai sebagai wadah aspirasi rakyat hendaknya bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Adapun dalam Islam di wujudkan dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Cak Nur mengungkapkan bahwa partai oposisi pada hakekatnya adalah partai yang tidak ikut dalam pemerintahan atau partai yang berada di luar pemerintah sehingga partai yang kalah dalam pemilu dan tidak masuk dalam pemerintahan hendaknya dengan tegas menyebut dirinya sebagai partai oposisi.

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- *BAPAK- IBU TERCINTA*
- *KAKAK DAN ADIK-ADIKU TERSAYANG*
- *CALON IBU DARI CALON ANAK-ANAKKU*
- *SEMUA GURUKU DARI SD HINGGA KULIAH*
- *SAHABATKU YANG SENASIB, SEPERJUANGAN dan....*
- *MEREKA YANG MENCINTAI DIRIKU SEPENUH HATINYA*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memberi limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga keselamatan dan lindungan serta *ridla* dari Allah senantiasa menyertai kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“KONSEP PARTAI OPOSISI MENURUT PEMIKIR MUSLIM (membedah pemikiran Nurcholish Madjid)”** ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari Bapak/Ibu serta teman-teman, skripsi ini tidak akan terwujud sedemikian rupa. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu –moril maupun materiil- dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan ini
3. Bapak Drs. Miftah AF, M.Ag., dan Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan Fakultas dan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak, Ibu, Adik, Kakak tercinta yang telah berdoa dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Se-Angkatan 2011, se-KKNan, Teman-teman dekatku: Syamsul, Mahmudi, Murobbi dan Alm. Lutfan, Terimakasih atas pengorbananmu.
8. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak proses penulisan ini.

Semoga amal baik beliau-beliau tersebut mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan, demi perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Juni 2005

Penulis

Ahmad Faizal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : PARTAI OPOSISI DALAM ISLAM

A. Definisi Partai	19
B. Definisi Oposisi	21
C. Pandangan Islam Terhadap Partai Oposisi	24
1. Sejarah Oposisi dalam Islam.....	24
2. Aliran-Aliran Oposisi dalam Islam.....	31

BAB III : PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PARTAI OPOSISI

A. Biografi Nurcholish Madjid.....	37
------------------------------------	----

1. Latar Belakang Nurcholish Madjid.....	37
2. Pendidikan Nurcholish Madjid	40
B. Karya-karya Nurcholish Madjid	46
C. Kerangka Metodologis Pemikiran Nurcholish	54
D. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Partai Oposisi	58
BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PARTAI OPOSISI	
A. Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Oposisi Ditinjau Dari Perspektif Islam	64
B. Analisis Peran Dan Kedudukan Partai Oposisi Dalam Pemerintahan Yang Sah Menurut Nurcholish Madjid.....	78
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu wilayah yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Menurut Prof. Soenarko negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah dan teritorial tertentu, dimana kekuatan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souveregn* (berdaulat atau negara memegang kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan pihak asing) .Sedangkan menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuandengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.¹

Negara terbagi menjadi beberapa bentuk dan diantaranya adalah negara demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu isu dan wacana yang mampu mengintegrasikan cita-cita ideal manusia sejagad, karena wacana demokrasi mampu melintasi sekaligus melampaui batas-batas geografis, suku

¹Fisip Unsil, "Pengertian Negara–Definisi Negara Menurut Para Ahli", Kumpulan terbaru 2016, diakses dari <http://fisipunsil.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-negara.html?m=1>, pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 07.15 WIB.

bangsa, agama dan kebudayaan.² Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan penting dan sangat menentukan. Disamping itu, ada juga pepatah yang mengatakan kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi (*salus populi supreme lex*). Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat.³

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Selain prinsip *trias politica* juga terdapat prinsip lain seperti pluralisme, kebebasan dan persamaan. Prinsip *pluralisme* memberikan penegasan bahwa setiap perbedaan yang ada di Indonesia baik itu agama, ras, suku dan sebagainya merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakan. Sedangkan prinsip persamaan memberikan pengertian bahwa setiap warga

²Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 11.

³Jaih Mubarak, *Fikih Siyasah: Studi tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 47.

negara baik itu pejabat maupun rakyat biasa mempunyai persamaan dan kesempatan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Begitu pula dengan prinsip kebebasan menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya dan membentuk perserikatan. Karena itu demokrasi menjadi alternatif sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan adalah kebebasan membentuk perserikatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan maupun membentuk organisasi politik (partai politik). Organisasi politik atau yang biasa disebut dengan partai politik ini akan mampu menyerap dan sekaligus menyuarakan aspirasi dan harapan-harapan yang diinginkan oleh segenap anggota masyarakat.

Partai Politik dalam era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁵ Disini terlihat ada beberapa unsur penting dalam pembentukan partai politik, antara lain yaitu adanya orang-orang, ikatan

⁴ Civic Education, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 161.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998, hlm. 5.

antara mereka hingga terorganisir menjadi satu kesatuan, serta orientasi, nilai, cita-cita, tujuan dan kebijaksanaan yang sama.

Dalam praktek kekinian, setidaknya ada empat fungsi partai politik, yaitu:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat.
3. Partai sebagai sarana rekrutmen anggota. Partai bertugas menggalang anggota dari masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi mereka
4. Partai sebagai sarana pengatur konflik. Partai mempunyai kewenangan dalam berbagai kebijakan yang syarat dengan berbagai masalah yang ada.

Oleh karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai pulau, suku dan agama dan golongan lainnya, maka diperlukan banyak penyerapan aspirasi dalam arti diperlukan banyak partai (multi partai) yang menyerap aspirasi mereka sehingga tidak terjadi diskriminasi di antara kelompok masyarakat maupun masyarakat merasa terkucilkan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Sistem multi partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan dengan sistem dwi-partai atau partai tunggal. Walaupun ada yang menganggap bahwa multi partai hanya melahirkan perbedaan dan perpecahan umat.⁶ Sedangkan Islam mewajibkan persatuan dan melarang perpecahan serta perbedaan seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّواْ وَمَا أَدْرَاكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُؤَادِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ لَهُمْ خُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَانْقَضَتْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.(Q.S. Ali-Imran: 103).⁷

Namun demikian dalam sistem multi partai hanya menitikberatkan kekuasaan pada lembaga legislatif sehingga peranan lembaga eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

Adanya multi partai mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita dan keinginan masyarakat. Karena pemimpin pada dasarnya juga mempunyai keterbatasan dalam hal

⁶Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj.Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, hlm. 207.

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1978, hlm. 92.

pemikiran, pengelolaan dan kepemimpinan. Sehingga tidak bisa dipungkiri juga dapat melakukan hal-hal yang keliru dalam mengelola bangsa ini.

Berbeda dengan sistem multi partai, dalam sistem dwi-partai sudah jelas letak tanggungjawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi partai. Di dalamnya ada partai yang berkuasa (partai yang menang dalam pemilihan umum) yang berperan sebagai pelaksana pemerintahan dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilihan umum) yang berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal opposition*) atau dapat juga sebagai pengecam tanpa ampun (*opositionalisme*) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.⁸

Keputusan menjadi golongan oposisi ini didasari oleh adanya beberapa perbedaan pemikiran dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Perbedaan pemikiran jangan dianggap sesuatu yang negatif yang dapat merusak dan menghambat jalannya roda pemerintahan. Namun sebaliknya perbedaan pemikiran tersebut akan menghasilkan banyak alternatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga tidak terjadi lagi pemaksaan pemikiran yang sudah jelas tidak tepat untuk diterapkan.

Namun demikian menjadi oposisi bukan asal berbeda dan menganggap pemerintah secara *sinis*, lemah dan gagal. Oposisi bukan pula sekedar menentang suatu kebijakan tanpa alasan dan landasan yang jelas serta

⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 168.

tepat, melainkan berdasar pada program-program yang telah direncanakan namun tidak terlaksana karena kalah dalam pemilihan umum. Karena pada dasarnya partai oposisi bertindak sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* seperti yang telah dijelaskan Allah dalam Firman-Nya

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran :104).⁹

Maka untuk membuktikan kepada pemilih bahwa mereka telah keliru dalam menentukan pilihan yaitu dengan membandingkan antara rencananya dan realisasi yang dikerjakan oleh pemerintah. Dengan demikian maka terlihat jelas keunggulan masing-masing program, sehingga pada pemilu berikutnya pemilih dapat melihat kembali kualitas dan kemampuan masing-masing kontestan berdasarkan pada pengalaman dan kenyataan yang telah dilalui.

Nurcholish Madjid (akrab dengan panggilan Cak Nur) adalah putera KH. Abdul Madjid,¹⁰ menyatakan bahwa oposisi adalah suatu kenyataan. Jika kelompok oposisi ini tidak di akui, yang terjadi adalah mekanisme saling curiga dan melihat oposisi sebagai ancaman.¹¹ Pria yang dilahirkan di sebuah kampung kecil di Desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939,

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *loc.cit*.

¹⁰Marwan Saridjo, *Cak Nur: Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia tetap Berjilbab*, Jakarta: Penamadani, 2005, Cet. II, hlm. 5.

¹¹Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, artikulasi nilai Islam dalam wacana sosial politik kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 7.

bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1358 H,¹² menegaskan oleh karena itu oposisi hendaknya tetap berjalan bersama dengan pemerintah, kalau ada kebijakan dari pemerintah yang sekiranya baik untuk masyarakat hendaknya tetap di dukung dan apabila ada kebijakan yang bertentangan dengan tujuan dari partainya atau terlalu melenceng dari komitmen awal untuk mensejahterakan rakyat hendaknya sebagai partai oposisi memberikan pendapat sesuai dengan porsinya masing-masing.

Orang yang pernah mondok di Pondok Pesantren Gontor ini mengaskan bahwa oposisi yang hanya sekedar oposisi atau yang disebut *oposisionalisme* itu negatif, karena *oposisionalisme* disini hanya sekedar menentang, sangat subyektif, bahkan mungkin itikadnya kurang baik, seperti biasa mendaftarkan kesalahan orang semata.¹³ Sehingga sangat riskan terjadinya ancaman-ancaman terhadap pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam pemerintahan yang sah ada kalanya partai oposisi yang menguasai legislatif lebih banyak dibandingkan partai pemerintah. Tentu ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk melaksanakan kinerjanya sebagai kepala pemerintah apabila bertentangan dengan partai oposisi yang berada di lembaga legislatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akhirnya tertarik untuk meneliti secara lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan

¹²Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2005, hlm. 68.

¹³Nurcholish Madjid, *loc.cit.*

oposisi yang di perankan partai politik di Indonesia dilihat dari pemikiran Nurcholish Madjid.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep partai oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid dalam prespektif Islam?
2. Bagaimana kedudukan dan peran partai oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid terhadap pemerintahan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian disesuaikan pada perumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui konsep partai oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid dalam prespektif Islam
2. Untuk mengetahui kedudukan dan peran partai oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid terhadap pemerintah di Indonesia

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam kajian ilmiah, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam terutama dalam hal hukum Islam tentang bagaimana sebuah partai politik berperan sebagai oposisi dan korelasinya terhadap peningkatan mutu kinerja pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemecahan masalah bagi kalangan akademisi khususnya di bidang *siyasa* (perpolitikan) agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum terutama seputar oposisi partai politik dalam segala bentuknya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu telah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai **“KONSEP PARTAI OPOSISI MENURUT PEMIKIR MUSLIM(Membedah Pemikiran Nurcholish Madjid)”**, penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada

Berikut ini adalah beberapa studi/tulisan yang membahas seputar pemikiran sosial politik Nurcholis Madjid. Diantaranya, adalah *Agama dan*

Negara, Analisis Kritis pemikiran politik Nurcholis Madjid, dikaji perihal Islam dan politik, hubungan historis pergerakan Islam Indonesia dengan Nasionalisme, dan implikasi pemikiran politik Nurcholish Madjid terhadap budaya politik “golongan” Islam.¹⁴

Selain itu, buku Marwan Saridjo dengan judul *Cak Nur: Diantara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Ini merupakan sebuah tulisan tentang dua tokoh, yaitu Cak Nur dan Musdah Mulia. Penulis hanya mengambil tokoh Cak Nur, karena tema yang diambil oleh penulis adalah pemikiran Cak Nur, isi dari buku ini mengisahkan dari awal perjalanan Cak Nur, mulai dari pendidikan, latar belakang keluarga, pernikahan, pemikiran hingga kepada Yayasan Paramadina. Pembahasan dalam buku ini hanya membicarakan Cak Nur secara umum.¹⁵

Kemudian ada buku yang berjudul : *Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, yang pada mulanya adalah sekripsi dengan judul aslinya “*Elaborasi Posisi masyarakat Madani Nurcholish Madjid: Tinjauan Hermeneutika Sosial*”, buku ini secara umum berisi tentang sejarah masyarakat madani, pemikiran Nurcholis tentang masyarakat madani yang di dalamnya berisi tentang kedudukan manusia di

¹⁴ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara, Analisis Kritis pemikiran politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: Murai Kencana, 2004, hlm. 48-164.

¹⁵Marwan Saridjo, *op.cit*, hlm. 1-7.

bumi, ketaatan terhadap pemimpin dan mengenai musyawarah atau konsultasi, yang di dalamnya juga di bicarakan mengenai Piagam Madiah.¹⁶

Sebagai pembanding, penulis mencoba mengkomparasikan dengan buku yang sedikit kontra dengan pemikiran Cak Nur, yaitu salah satu buku yang berjudul *Oposisi Islam* yang ditulis oleh Dr. Neveen Abdul Khalik Musthafa¹⁷. Dalam buku ini, Dr. Neveen memberikan penjelasan bagaimana oposisi itu lahir dan latar belakangnya serta berbagai macam aliran oposisi yang tentunya ini sangat menarik apabila kita menganalisis pemikiran Nurcholish Madjid dengan aliran oposisi yang telah di jelaskan oleh Dr. Neveen. Aliran manakah yang sekiranya sesuai dengan pemikiran Nurcholish Madjid menurut analisis penulis yang nantinya akan di jabarkan dalam bab IV.

Selain buku-buku tersebut di atas, di Fakultas Syari'ah sendiri, berdasarkan penelusuran penulis sudah ada empat orang yang membuat skripsi dengan pemikiran tokoh Nurcholish Madjid. Skripsi pertama dengan judul *Menggagas Oposisi Loyal terhadap Pemerintah menurut Dr.Nurcholish Madjid (Mencari format Oposisi Ke Indonesiaan persfektif Fiqh Siyasah)*. Skripsi ini juga menganalisis oposisi loyal yang digagas oleh Nurcholis Madjid dalam pemikirannya. Prinsip dan esensi dari oposisi loyal ini adalah "*chek and balance*. Dan dalam al-Quran juga terdapat prinsip *al-amru*

¹⁶Sufyanto, *Elaborasi Posisi masyarakat Madani Nurcholish Madjid: Tinjauan Hermeneutika Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 113.

¹⁷Neveen Abdul Khalik, *Al-Mu'aradhah fi Fikr al-siyasi al-Islami*, Terj. Oposisi Islam, Yogyakarta: Lkis, 2012, hlm. 231.

bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'al-mungkar, yaitu membela hak atau malah mengajak kepada tiap individu untuk mengkritik, mengubah atau meralat pelanggaran dan kejahatan jika dia menyaksikan atau mengantisipasi terjadinya kemungkaran¹⁸.

Skripsi yang kedua dengan judul *Studi Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang sekularisasi politik*, disini permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pemikiran Nurcholish mengenai sekularisasi dalam bidang politik dan bagaimana relevansinya terhadap perpolitikan di Indonesia dari permasalahan tersebut jawaban yang di hasilkan adalah wacana yang dilakukan Nurcholish ternyata menimbulkan optimisme sekaligus kekhawatiran. Bagi yang pro ke Nurcholish, optimisme, Nurcholish dipandang sebagai pembaharu yang mampu mendongkrak kebekuan pemikiran umat dan menawarkan sejumlah posisi yang menyegarkan dan menjanjikan kedamaian di masa depan. Sementara bagi kelompok yang kontra khawatir justru dianggap sebagai pemicu yang menimbulkan masalah dan mengacaukan strategi perjuangan umat Islam yang konon telah menjadi konsensus para aktifis gerakan Islam atau partai Islam.¹⁹

Sedangkan yang ketiga ditulis oleh Misbahul Huda "Nim 2103056" dengan judul *Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Demokrasi*.

Dalam skripsi ini membahas demokrasi dari berbagai sudut pandang baik itu

¹⁸Akhmad Jamil, "Menggagas Oposisi Loyal terhadap Pemerintah menurut Dr. Nurcholish Madjid (Mencari format Oposisi KeIndonesiaan perspektif Fiqh Siyasah)" Skripsi Siyasah Jinayah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2012 hlm. 24, td.

¹⁹Abdullah Aziz, "Studi Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang sekularisasi politik" Skripsi Siyasah Jinayah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2012, hlm. 30-41, td.

sudut pandang Islam ataupun sudut pandang Nurcholish Madjid. Dalam skripsi ini demokrasi yang dicanangkan Nurcholish Madjid diharapkan dapat membawa ke dalam perkembangan dan perjalanan yang dinamis sehingga kedepannya dapat menuju ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Selain golongan atau partai tertentu, semua masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara penuh dalam menumbuhkan kembangkan demokrasi, terutama dalam bidang politik dan berperan sebagai *check and balance* kepada pemerintah sebagai upaya ambil bagian dalam kehidupan bernegara.²⁰

Dari apa yang telah penulis paparkan, sepengetahuan penulis, belum ada satu karya pun yang membahas tentang konsep partai oposisi menurut pemikir muslim (membedah pemikiran Nurcholish Madjid). Karena penulis disini akan mencoba menganalisa pemikiran Cak Nur tentang konsep partai oposisi dengan sudut pandang sejarah oposisi dalam Islam yang terbagi menjadi beberapa aliran, sehingga akan diketahui pemikiran Nurcholish Madjid terletak dalam aliran yang mana.

Maka dengan tetap merujuk dari beberapa studi / literatur yang telah ada di atas, menurut hemat penulis, penting sekali membahas tentang pemikiran politik Nurcholish Madjid, tokoh yang dijuluki sebagai “lokomotif” gerbong pembaruan pemikiran Islam di tanah air oleh majalah tempo. Cak Nur, begitu ia biasa dipanggil, tidak pernah ketinggalan untuk

²⁰Misbahul Huda, “Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Demokrasi” Skripsi Siyasa Jinayah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2013, hlm. 53, td.

mengemukakan gagasan menarik dalam berbagai bidang, termasuk yang terpenting kaitannya dengan penelitian ini, adalah perihal tentang partai oposisi dalam pemerintahan yang sah.

E. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yakni:

1. Jenis Penelitian

Melihat pada data-data yang diambil dalam skripsi ini, maka penelitian skripsi ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Karena dalam skripsi ini menyajikan tahapan penelitian dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu dan gejala yang hendak dipelajari. Di tambah dengan tahap melakukan pembahasan atau penelusuran kepustakaan (*literature review*).²¹ Karena jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Dan jika dilihat dari segi tujuan penelitian ini, maka penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu pemaparan data-data dalam satu variabel.

²¹ J.R Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 18.

Dan juga apabila dilihat dari segi tipe penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, doktriner, komparatif, yaitu penelitian pada doktrin-doktrin hukum dan membandingkannya satu dengan yang lain.

2. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis dan sumber yang dijadikan sebagai bahan pengambilan data penelitian ini, yakni:

- a. Sumber primer. Diambil dari buku-buku karya Nurcholish Madjid, salah satunya yakni buku *Dialog Keterbukaan (artikulasi nilai islam dalam wacana sosial politik kontemporer)*,
- b. Sumber Sekunder. Diambil dari buku *Oposisi Islam* karya Dr. Neveen Abdullah Malik Musthafa dari Turki sebagai pembandingan.

Sedangkan untuk sumber lainnya adalah penjelasan dan juga penafsiran terhadap karya Nurcholish Madjid yang terkait dengan objek penelitian, serta referensi-referensi pendukung lainnya. Kedua jenis data tersebut diambil langsung dari buku-buku yang terkait dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumenter, yakni dengan menelusuri bahan pustaka yang terkait dengan peran partai oposisi dan korelasinya terhadap peningkatan mutu kinerja pemerintah, baik itu dari pemikiran Nurcholish

Madjid maupun dari pemikiran Islam yang terkait dengan objek masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dalam skripsi ini dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data tersebut secara lengkap,urut, dan teratur, dan setelah itu dilakukan analisis dengan mencermati setiap pembahasan tema yang digarap.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku-buku pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi di fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penulis membaginya pada lima bab dan beberapa sub bab, yakni:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP OPOSISI.** Dalam bab ini, hal pertama yang akan dibahas adalah latar belakang secara umum kemunculan oposisi yang terjadi dalam sejarah

Islam, lalu pembahasan selanjutnya adalah definisi partai oposisi, dan terakhir pandangan Islam tentang partai oposisi.

BAB III PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PARTAI OPOSISI. Dalam bab ini mengemukakan tentang biografi dan karya-karya Nurcholish Madjid, setting sosial kehidupan Nurcholish Madjid, serta Pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai oposisi terhadap pemerintahan yang sah.

BAB IV ANALISIS TENTANG PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TERHADAP PARTAI OPOSISI. Dalam bab ini merupakan analisis terhadap kerangka metodologis pemikiran Nurcholish Madjid serta pandangan Islam tentang partai oposisi.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

PARTAI OPOSISI DALAM ISLAM

A. Definisi Partai

Sebagaimana kita mengerti partai merupakan istilah politik sehari-hari untuk menunjukkan kekuatan politik di masyarakat dan partai tidaklah lahir dengan mudah. Partai merupakan peralihan jangka panjang dari istilah *faksi* yang jauh lebih tua umurnya. Sifat peralihan ini menyebabkan proses pengakuan masyarakat terhadap keberadaan partai penuh dengan kesukaran dan rintangan. Ini disebabkan keterkaitan antara partai dan *faksi*, karena *faksi* lebih dikenal di zaman tradisi Eropa sebagai organisasi penghasut yang ada dalam setiap bentuk organisasi politik.

Partai berasal dari bahasa Latin, *partire*, yang bermakna membagi,¹ sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia partai berarti perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan, dan setujuan (terutama di bidang politik).² Secara umum partai adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya mempunyai tujuan, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya adalah memperoleh kekuasaan politik untuk melaksanakan agenda-agendanya.³

Pada zaman penjajahan partai terkadang dijadikan sebagai wadah pemupukan kekuatan bangsa dan sebagai kekuatan pendobrak kekuasaan

¹ Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 1.

² <http://www.kamusbesar.com/28854/partai>, di akses tanggal 31 Maret 2016 jam 8.41.

³ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006, hlm. 34.

kolonial. Ideologi dalam partai dijadikan sebagai pengarah perjuangan dan pemimpin partai dijadikan alternatif sebagai penguasa masa depan.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yakni yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan - kebijakan mereka.⁴

Lain halnya dengan Bambang Cipto yang mempunyai pandangan bahwa partai politik merupakan peralihan jangka panjang dari istilah fraksi yang jauh lebih tua umurnya, sifat peralihan ini menyebabkan proses pengakuan masyarakat politik terhadap keberadaan partai penuh dengan kesukaran dan rintangan.⁵

Menurut Sumarno dan Yeni Lukiswara, partai politik merupakan sekelompok manusia yang mengorganisir dirinya dalam bentuk organisasi politik yang didasarkan pada suatu ideologi, dengan maksud untuk memperoleh atau merebut suatu kekuasaan didalam pemerintah. Jadi partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah.⁶

Definisi lainnya dikemukakan oleh Cheppy Haricahyono, dalam bukunya “ilmu politik dan perspektifnya” mengatakan bahwa partai politik

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 160.

⁵Bambang Cipto, *OpCit*, hlm. 7.

⁶Sumarno dan Yeni Lukiswara, *Pengantar Study Ilmu Politik*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1992, hlm. 62.

adalah sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional.⁷

Sedangkan menurut Deliar Noer, Partai politik merupakan himpunan orang-orang yang mempunyai ideologi sama atau tempat/wadah penyaringan dan pembulatan, serta tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai ide sama, cita-cita dan kepentingan.⁸

Jadi partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, melalui pemilihan umum.⁹

B. Definisi Oposisi

Secara etimologi oposisi berasal dari bahasa Inggris *opposition* (*opposites*, *oppnore* dalam bahasa latin) yang berarti memperhadapkan, membantah, dan menyanggah.¹⁰ Sedangkan secara terminologi, oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik pemerintahan yang sedang berjalan.¹¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, oposisi diartikan sebagai partai penentang di dewan perwakilan dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan mayoritas yang berkuasa.¹²

⁷Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991, hlm. 192.

⁸Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 209.

⁹Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 “Tentang Partai Politik”, Yogyakarta, 2003, hlm. 8.

¹⁰Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 754.

¹¹Jhon McGill dan Eddy Soetrisno, *Kamus Politik*, Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1996, hlm. 154.

¹²Tim Penyusun Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 628.

Eep Saifullah Fatah mendefinisikan oposisi sebagai setiap ucapan atau perbuatan yang meluruskan kekeliruan sambil menggaris bawahi dan menyokong segala sesuatu yang sudah benar. Sehingga maksud dari beroposisi politik adalah melakukan kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru dan bisa benar. Jadi oposisi bukanlah penentang, oposisi bukan pula sekedar pihak yang mengatakan ketidaksetujuan, oposisi bukanlah golongan atau partai yang hanya teriak semata-mata, dan bukan pula kalangan yang melawan kekuasaan secara membabi buta.¹³

Dalam ilmu politik definisi oposisi adalah partai yang memiliki kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan. Oposisi bukanlah musuh, melainkan mitra tanding (*counter player*) dalam percaturan politik.

Dalam wacana politik, oposisi ditinjau dari dua aspek yaitu aspek kultural dan aspek struktural. Pada aspek kultural menekankan bahwa oposisi sudah menjadi sebuah kebutuhan mutlak dalam membangun bangsa kedepan yang lebih baik. Mencermati bukan sekedar turut menyaksikan apa saja yang berlalu didepan mata, akan tetapi siap-siaga untuk melakukan *counter discourse* atau gelar wacana tandingan, dialog, kampanye publik, dan lain sebagainya.

Perilaku beroposisi seperti ini dapat diperankan oleh siapa saja dan kapan saja. Sedangkan dalam aspek struktural, oposisi dimaknai dengan mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkuasa, namun dengan tidak banyak

¹³Eep Saifullah Fatah, *Membangun Oposisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 11.

memproduksi aksi positif, cukup dengan menolak tegas secara moral kebijakan tersebut, untuk selanjutnya menunggu perkembangan yang akan berlaku. Dengan bahasa lain merupakan oposisi yang miskin strategi dan miskin program, ini persis sama dengan kondisi gerakan oposisi di Indonesia.¹⁴

Oposisi dalam ilmu politik tidak terlepas dari perkembangan partisipasi yang lebih luas dalam proses politik. Menurut Myron Weiner partisipasi disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

1. Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan proses demokrasi yang berdaulat. Bentuk kebebasan dalam bingkai pluralisme menuntut partai untuk andil dalam kekuasaan.
2. Perubahan struktur sosial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi era modern yang memunculkan.

Format oposisi dalam bentuk ajaran mengimbangi kekuasaan (*check and balance*)¹⁵ negara yang diletakan dalam kerangka konstitusi. Format oposisi ini biasa dilakukan oleh partai politik yang menginginkan perubahan atau mengkritisi kinerja pemerintahan. Konstitusi mutlak merupakan kata akhir dan perwujudan legitimasi, penyimpangan terhadap konstitusi berarti

¹⁴<http://ashlf.com>Aries Sugi Hartono, oposisi semu di Indonesia, diakses pada tgl 9 maret 2016.

¹⁵Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta:Paramadina, 1999, hlm. 13.

melampaui batas mandat politik. Pada konteks ini oposisi dapat disebut sebagai sistem kontrol konstitusi.

Sistem *check and balance* merupakan sebuah mekanisme untuk mampu mengoreksi dan meluruskan sebuah pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap pengekanan kebebasan dan pencekalan dalam mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntutan sebuah falsafah sebuah negara atau hak asasi manusia. Peran oposisi partai politik sangat penting untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan secara konsisten, objektif dan berpegang pada kebenaran. Serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Adanya oposisi di parlemen akan mempersempit kemungkinan terjadinya tiranisme dan otoritarianisme.

C. Pandangan Islam Terhadap Partai Oposisi

1. Sejarah Oposisi dalam Islam

Sepanjang perkembangan historis masyarakat dunia, konflik antar berbagai sudut pandang merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan lagi dalam bidang-bidang kemanusiaan. Oleh karena itu, masyarakat sekarang ini selalu mengenal fenomena oposisi dengan berbagai coraknya. Oposisi sendiri dalam perkembangannya telah melewati berbagai sejarah panjang yang berakhir dengan adanya oposisi legal kepartaian.

Di Indonesia perkembangan partai oposisi baru di akui keberadaannya setelah masa orde baru tumbang. Hal ini menyebabkan partai oposisi dalam era pasca kemerdekaan sangat sulit di akui

eksistensinya terutama dalam masa orde baru. Mengingat pada masa itu kebebasan sangatlah di batasi dan berbagai gerakan kontra pemerintah tak jarang mendapatkan perlawanan keras dari pemerintah. Oleh karena itu partai oposisi pun masih kurang menunjukkan eksistensinya dalam pemerintahan.

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, budaya dan bahkan politik sekalipun, agar manusia tidak tersesat dan selalu berada pada jalan yang telah digariskan-Nya.

Ketika seorang pengkaji mengamati *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi serta dalam berbagai khazanah pemikiran Islam yang disampaikan pada masa Khulafaur Rasyidin menemukan bahwa secara keseluruhan, wacana Islam memerintah dan mengajak kaum muslim untuk beroposisi. Disamping itu mendorong ummat untuk melakukan reformasi, bahkan bersikap menentang jika keadaannya menghendaki demikian.

Fokus pokok oposisi tercermin dalam kewajiban yang dibebankan syari'at kepada seluruh manusia untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Menurut Imam Hamid Al-Ghazali dalam kitab *ihya 'ulumuddin*, hal itu merupakan kutub terbesar agama.¹⁶

¹⁶Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. oleh M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 132.

Kewajiban tersebut, dalam praktiknya, dewasa ini telah dihapus, bahkan hanya difokuskan dalam masalah moral saja. Tetapi menurut pengalaman pahit kaum muslim dan menurut kebanyakan ulama, kewajiban ini merupakan istilah politik pada peringkat pertama. Ia juga merupakan substansi pokok untuk proses perubahan, baik itu dalam skala individu, kelompok, maupun umat secara keseluruhan.

Suatu amalan yang sangat penting dalam menjalankan suatu roda pemerintahan bagi mereka yang mendapatkan amanah dari umat adalah melaksanakannya dengan baik, dan sebaik-baiknya umat adalah yang berani memperingatkan dan mengkritisi suatu kekeliruan yang dilakukan oleh kepala negara. Karena itu, suatu bentuk kritikan bukan hanya sekedar hak, tetapi bahkan merupakan kewajiban menurut syari'at.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa sebagai muslim kita senantiasa dituntut untuk taat kepada Allah, rasul dan para pemimpin kita, tetapi kesepakatan itu segera disusul dengan satu klausul politik selama para penguasa tidak menyeleweng. Artinya, ketika para pemimpin melakukan perbuatan maksiat (kepada Allah dan Rasul-nya), maka tidak ada ketaatan lagi kepadanya. Dalam konteks ini, umat diperkenankan bahkan diharuskan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap para pemimpinnya.

Tentu dalam melakukan kritik tidak lepas dari syarat sebagai pemimpin yang telah terpenuhi antaranya seperti yang di utarakan oleh Al-

Farabi. Beliau merekomendasikan empat syarat bagi seorang calon kepala negara yakni:

- 1) berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah undang-undang yang dibuat para mujtahid itu sah menurut hukum agama dan lainnya;
- 2) bersifat jujur dan shalih
- 3) bertindak adil dalam menjalankan tugas pemerintah dan berkemampuan mengelola administrasi
- 4) berasal dari keturunan Quraisy. Beliau menegaskan bahwa kelompoknya mempertahankan syariat dengan menetapkan pemimpin menjadi hak Quraisy.

Sementara al-Mawardi mempersyaratkan calon kepala negara sebagai berikut:

- 1) berlaku adil dalam segala persyaratannya
- 2) berilmu pengetahuan agar ia mampu berijtihad
- 3) sehat pendengaran dan penglihatan serta lisan
- 4) memiliki anggota tubuh yang sempurna
- 5) berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umum
- 6) keberanian untuk melindungi rakyat dan meghadapi musuh,
- 7) keturunan Quraisy.

Sedangkan al-Ghazali menawarkan syarat kumulatif bagi calon kepala negara, yaitu:

- 1) seorang laki-laki dewasa
- 2) berakal sehat
- 3) sehat pendengaran dan penglihatan
- 4) merdeka;
- 5) berasal dari suku Quraisyh
- 6) memiliki kekuasaan yang nyata (al-nadjat);
- 7) memiliki kemampuan (kifāyah)
- 8) wara'
- 9) berilmu¹⁷

Dalam pandangan Islam, oposisi tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan ataupun mengganggu pemerintahan yang sedang berkuasa, tapi bersikap tegas, tidak kompromi terhadap kedzaliman, sikap tegas ini mengandung konsekuensi berani mengatakan “tidak” jika salah dan berani mengatakan “benar” jika memang benar adanya. Atas dasar inilah, maka termasuk bagian tegas ini adalah tidak malu mendukung kebijakan pemerintah jika dipandang tepat, dan sebaliknya tidak takut untuk mengkritik suatu kebijakan jika dipandang salah.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyimpangan terhadap hak rakyat, pelanggaran terhadap amanat rakyat. Penyimpangan dari keadilan dan menghilangkan kebebasan manusia, maka diperlukan partai

¹⁷ Mashudi, Mei 2014, *REFORMULASI HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA: Dialog Pemikiran Yusuf al-Qardhawy dengan Ulama Klasik tentang Politik Kenegaraan dan Implikasinya bagi Perpolitikan di Indonesia*, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, hlm. 217, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/265/246>, 21 Juni 2016.

politik atau kelompok yang independen yang mengawasi jalannya pemerintahan di dalam birokrasi untuk selalu objektif dalam menilai setiap kebijakan yang dibuat.

Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam sistem pemerintahan Islam ada lembaga perwakilan rakyat yang lebih dikenal dengan majelis umat. Tugas dari majelis umat ini membaiaat kepala negara sebagai bentuk dari kontrak sosial, ini tidaklah bersifat mutlak dan permanen, tetapi bersifat bersyarat yang bergantung pada para penguasa dalam menjalankan kontrak sosial yang disepakati sesuai atau tidak dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan berdasarkan agama.

Dari tugas majelis umat, maka hak dan kebebasan beroposisi merupakan produk alami dari kebebasan pendapat, keadilan dan kesetaraan. Produk alami ini adalah kaidah-kaidah dasar dari sistem pemerintahan Islam, yang berarti bahwa dalam hukum Islam menerima munculnya oposisi dan melindunginya.

Dalam sejarah Islam permulaan dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah-musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Beliau mengembangkan kebebasan pendapat di kalangan para sahabatnya. Kegemaran Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabatnya mengindikasikan

bahwa Nabi mengakui kebebasan berfikir dan berpendapat, dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu sebagai suatu nilai yang bermanfaat.¹⁸

Islam telah menjadikannya sebagai tugas Muslim dan Muslimat untuk membentuk masyarakat yang sehat, yang bersih dari korupsi dan perbuatan tercela dan untuk selalu berkelakuan baik dan menghindari kezhaliman. Tugas ini dituangkan dalam prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, menyeru orang kejalan kebajikan dan mencegah ketidakadilan adalah tanggung jawab bersama dari negara dan rakyat. Suatu pemerintahan Islam tidak bisa bersikap netral berkenaan dengan kondisi moral religius dari masyarakat.

Syariat islam telah menetapkan peemulaan muasyawah dan menjadikannya salah satu pondasi dari hukum dan politik yang tidak mempunyai perincian, pembatasan, serta formulasinya bagi ummat islam. Al-Qur'an belum memformulasikannya dan Rasul juga belum memberikan tata aturan yang khusus dari musyawarah itu sendiri, karena musyawarah merupakan hal yang di dalamnya terdapat perubahan sudut pandang dan perubahan pada generasi yang menjalankannya, serta kemajuan masyarakat. Oleh karena itu apabila ditetapkan aturan yang baku terhadap musyawarah, maka akan mempersempit pemahaman musyawarah bagi mereka. Ini secara sengaja ditinggalkan tanpa aturan baku agar menjadi rahmat bagi sekalian manusia.

¹⁸Fuad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman ilmu jaya, 1988, hlm. 75-76.

2. Aliran-Aliran Oposisi dalam Islam

Dalam sejarah politik Islam terdapat fenomena dimana oposisi di apresiasikan sebagai sikap rakyat (*al-mahkum*) terhadap penguasa (*al-hakim*) yang dzalim. Menurut Dr. Neveen dalam bukunya Oposisi Islam yang telah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, membentuk tiga konsepsi Islam. Masing-masing konsepsi tersebut merupakan prinsip yang mengkristalkan aliran pemikiran oposisi dalam nalar politik Islam.¹⁹

a. Aliran Revolusi

Dasar aliran ini sebenarnya terdapat dalam dasar Islam itu sendiri dengan dua sayap utamanya adalah kaum Khawarij dan Syiah yang merupakan paham politik dan agama pertama yang muncul dalam sejarah Islam.²⁰ Kedua kelompok ini mempresentasikan aliran revolusi baik secara ide maupun praktiknya dengan berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemenangan dan melawan kelaliman dari pemimpin dzalim wajib menggunakan cara kekerasan dengan pedang.

Kelompok revolusioner yang menyatakan oposisi dengan jalan revolusi ketika menjalankan legalitas pelaksanaan revolusi tersebut berdasar pada al-Qur'an dengan dalil amar ma'ruf nahi munkar yang tertera dalam surah QS: 3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

¹⁹Neeven Abdul, *Oposisi Islam*, terj. *Al-Mu'aradhah fī fikr al-siyasi al-Islami*, Ali Ghufroon, Yogyakarta: LkiS, 2012, kata pengantar.

²⁰*Ibid*, hlm. 237.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”²¹

Untuk mengubah kemungkaran adalah suatu kewajiban yang memiliki prioritas utama dan jika *amar ma’ruf* telah berada pada batas *ad-da’watu bi alati hiya ahsan* (mengajak dengan cara yang lebih baik)maka nahi munkarnya telah melewati batasan ini menuju tindakan yang menjaminberhentinya perbuatan munkar tersebut.²² seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Turmudzi, Nasai dan Ibnu Hambal halaman 8-90 Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra., ia berkata ‘Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda,“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman.”(HR Muslim)²³

b. Alira Sabar

Sabar menurut bahasa adalah menahan secara jasmani²⁴ atau secara makna berarti menahan dari apa yang diharuskan akal dan

²¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1978, hlm. 92.

²²Neveen Abdul, *Op Cit*, hlm. 245.

²³Mustafa Dib al-Bugha, *Al- Wafi: Syarah Hadits arbain Imam An-Nawawi*, terj. Al-Wafi fi Syarh Hadits Al-Arbain Imam An-Nawawiyah, Muzayin, Jakarta: Mizan, 2007, hlm. 407.

²⁴Neveen, *Op Cit*, hlm. 306.

syari'at terhadap jiwa supaya tidak melakukannya.²⁵ Sabar merupakan salah satu aliran pengungkapan oposisi dalam Islam yang tidak menyetujui dan tidak menerima legalitas kezaliman maupun ksewenang-wenangan. Dalam kapasitasnya aliran ini mengungkapkan oposisinya dengan menahan jiwa dari apa yang diharuskan akal dan syariat supaya tidak menyerah terhadap kemungkar.

Sabar merupakan paham mayoritas kalangan Ahlusunnah untuk menghadapi kelaliman, ketidakadilan atau kEsewenang-wenangan. Mereka berpendapat bahwa penguasa yang tidak adil nantinya akan mendapatkan dosa sedangkan bagi kaum mukmin bersabar adalah hal yang utama.²⁶ Karena bagi mereka dalam menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu kewajiban yang sangat besar sehingga bersabar terhadap kemungkar jauh lebih ringan daripada melarang adanya kemungkar itu sendiri.

Sesungguhnya konsistensi mayoritas Ahlusunnah dalam memegang prinsip sabar merupakan bentuk dari kepatuhan mereka terhadap ketetapan dan perintah Allah. Karena sabar dalam Al-Qur'an merupakan tindakan terpuji sehingga pandangan mereka akan diberi pahala paling mulia karena telah patuh dan konsisten serta tunduk terhadap hukum atau perintah Allah. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

²⁵*Ibid*, hlm. 307.

²⁶*Ibid*, hlm. 305.

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ

وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar" (QS. 28:80)²⁷

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (QS. 2:153)²⁸

Sabar bukan berarti menjadi menerima semua realita yang ada, namun berbeda dengan aliran revolusi bahwa mereka memandang dengan sikap penolakan secara diam dan dengan hati adalah lebih utama. Seperti berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman"²⁹.

Dalam hadits tersebut sabar merupakan mencegah kemungkaran dengan hati dan kadang-kadang dengan lisan. Karena sabar dan revolusi merupakan dua level berdeba dalam sebuah oposisi. Revolusi

²⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1978, hlm. 766.

²⁸*Ibid*, hlm. 53.

²⁹Mustafa Dib al-Bugha, *Loc. Cit*

disebut dengan oposisi aktif sedangkan sabar merupakan bentuk tindakan dari oposisi pasif. Secara hierarki revolusi berada pada peringkat pertama karena perubahan dengan tangan merupakan kekuatan yang lebih dulu daripada dengan lisan dan hati.³⁰

Sabar dalam bentuk oposisi pasif tidak serta merta hanya diam dan berpangku tangan terhadap ketetapan Allah, melainkan ada beberapa ketentuan diantaranya adalah:

- 1) Tidak berkerja sama dengan penguasa lalim
- 2) Kecenderungan untuk mengkaji fiqh, hadits, mengundurkan diri dari kekuasaan dan cukup memberikan nasehat kepada penguasa dan rakyat.

c. Aliran Kapabelitas

Aliran ini hadir untuk memberikan tambahan prinsip lain bagi oposisi Islam. Ciri khas dari aliran ini adalah bahwa mereka akan bersabar sampai berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mensukseskan oposisinya. Aliran ini merupakan rekasi dari aliran revolusi yang gagal dalam pengalamannya dalam sejumlah faktor demi berjalannya revolusi.³¹

Adapun syarat bagi aliran ini dalam melaksanakan oposisinya yaitu dengan cara:

- 1) Membandingkan bahaya yang sedang berlangsung dan bahaya yang diperkirakan akan terjadi

³⁰Neveen, *Op Cit*, hlm. 361.

³¹*Ibid*, hlm. 383

- 2) Bersiap-siap mengakui legalitas revolusi terhadap penguasa dzalim ketika revolusi itu sukses
- 3) Kapabelitas dan jaminan suksesnya revolusi

Syarat kapabelitas merupakan kondisi tengah-tengah antara sabar dan revolusi. Aliran ini muncul sebagai konsekuensi dari sejumlah kegagalan revolusi yang tidak ada persiapan cukup dalam menjalankan pemberontakan terhadap penguasa yang tidak adil. Panji utama aliran ini adalah pendapat dari Abu Hanifah dan pemikiran mayoritas Mu'tazilah.

BAB III
PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
TENTANG PARTAI OPOSISI

A. Biografi Nurcholish Madjid

1. Latar Belakang Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid (akrab dengan panggilan Cak Nur) adalah putera KH. Abdul Madjid¹ yang lahir di desa Mojoanyar kecamatan Bareng Jombang Jawa Timur tanggal 17 Maret 1939 M atau bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram 1358 H*. Nurcholis Madjid menghembuskan nafas terakhir dengan wajah damai setelah melafalkan nama Allah pada Senin 29 Agustus 2005 pukul 14.05 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta Selatan. Ia dibesarkan dari latar keluarga pesantren. Ayahnya adalah seorang kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang yang didirikan dan dipimpin oleh pendiri Nahdlotul Ulama, *Hadiatus Syaikh Hasyim Asy'ari*.

Karena itu, hubungan antara murid dan sang guru ini kemudian semakin erat karena beberapa alasan. *Pertama*, kiai Madjid merupakan santri Hasyim Asy'ari, tokoh karismatik yang memelopori lahirnya NU.² *Kedua*, Abdul Madjid sendiri pernah dinikahkan dengan Halimah, seorang wanita keponakan gurunya. Tentang hal ini, Cak Nur sendiri pernah mengisahkannya, “waktu itu kyai Hasyim Asy'ari sendiri yang

¹ Marwan Saridjo, *Cak Nur: Diantara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia tetap Berjilbab*, Jakarta: Penamadani, 2005, hlm. 5.

² Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wana Mulia, 1998, hlm. 121-122.

menginginkan ayah menjadi mantunya”.³ Tapi demikian diungkapkan Cak Nur, pernikahan tersebut tidak membuahkan keturunan. Karena alasan inilah mereka kemudian ‘berpisah’ secara baik-baik. Hasyim Asy’ari menganjurkan ayah untuk menikah dengan ibu saya sekarang. Demikian Cak Nur menuturkan hingga ayahnya berkenalan dengan ibunya. Ibu Cak Nur sendiri adalah putri kiai Abdullah Sadjad dari Kediri, yang juga teman baik kiai Hasyim Asy’ari.

Sketsa singkat latar belakang keluarga Cak Nur di atas cukuplah untuk menunjukkan bahwa ia terlahir dari sub kultur pesantren.⁴ Tak heran dalam menghirup ketegangan kultural antara penghayatan seorang anak manusia dengan perubahan yang menyertai dinamika masyarakat Jawa saat itu, sedikit banyak juga ikut mempengaruhi visi Cak Nur di kemudian hari. Melewati masa mudanya, Cak Nur misalnya, merupakan salah seorang yang menjadi saksi dari berbagai ketegangan kultural yang mewarnai Jombang kala itu. Seperti kita tahu, Jombang secara geografis berada di daerah jantung Islam Jawa. Sebagai jantung Islam, ia menyerap dan menyalurkan berbagai gejolak masyarakat tempat Cak Nur melewati masa kecilnya.

Cak Nur sendiri pernah mengungkapkan kegiatannya kala itu, “yang menjadi sumber kebencian saya terhadap komunitas lain”, demikian

³ *Ibid.* hlm. 123.

⁴ Sebuah Sub Kultur minimal harus memiliki keunikannya sendiri dalam aspek-aspek berikut: Cara hidup yang dianut, Pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti, Serta hirarki kekuasaan intern tersendiri yang ditaati sepenuhnya. Ketiga persyaratan minimal ini terdapat dalam kehidupan pesantren, sehingga dirasa cukup untuk mengenakan predikat sub kultur pada kehidupan itu. Lihat Abdurrohman wahid, “pesantren sebagai subkultur”, lihat M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 43.

ujar Cak Nur dalam suatu kesempatan kepada *Editor*, Abanganisme zaman itu, menurut pengakuannya adalah PKI dan PNI Merah, yang siap menggilas anak-anak santri. Sebagai anak yang dibesarkan dalam tradisi pesantren dengan muatan kultural Jawa, perlahan Cak Nur kecil tumbuh menjadi seorang pribadi. Ia mereguk pemahaman agama dari dunia tempat agama tidak hanya diterima sebagai bagian ritualisme tetapi juga ketika keberagaman begitu dipengaruhi oleh kultur lokal.

Namun alasan politiklah yang agaknya cukup menarik sikap Cak Nur tersebut. Seperti kita tahu, pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan sejak itu NU berubah peran dari *jam 'iyyah* keagamaan menjadi partai politik. Ayah Cak Nur sendiri bersamaan aktif di organisasi tradisional keagamaan NU dan partai politik di bawah modernisme Islam, Masyumi. Ketika NU berpisah secara politis dengan Masyumi tahun 1952, ayahnya tetap memilih Masyumi, dan akhirnya mengirimkan anaknya dari pesantren tradisional ke pesantren modern yang masyhur, yaitu Gontor.⁵

Saat itu, ayah Cak Nur, yang kebetulan aktivis berat Masyumi merasa 'kecewa' pada NU, ketika organisasi itu keluar dari Masyumi dan membentuk partai politiknya sendiri. Karena ulah sang ayah inilah, santri kecil Cak Nur sering diledek teman-temannya yang NU sebagai "anak Masyumi kesasar".⁶

⁵ R. William Lidle, *Islam, Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997, hlm. 13-14.

⁶ Seperti dituturkan sendiri oleh Nurcholish Madjid, "Begitu tamat SD, sesuai tradisi keluarga, saya dimasukkan ke pesantren Darul Ulum Jombang. Waktu itu NU cakar-cakaran dengan Masyumi (1955), saya masuk pesantren NU, sehingga jadi ejekan santri lain. "ini anak

Mengingat masa itu, Cak Nur pernah menuturkan, “ayah sendiri dimusuhi oleh para kiai di Jombang. Karena situasi seperti ini, lalu saya minta agar ayah pindah saja ke NU”. Namun usul putranya ini ditolak oleh sang ayah dengan alasan, yang bisa berpolitik itu Masyumi, bukan NU. Demikian Cak Nur mengenang. Lagi pula, demikian Cak Nur sambil menytir kata-kata yang pernah diucapkan sang ayah, bahwa KH. Hasyim Asy’ari sendiri pernah berfatwa bahwa Masyumi merupakan satu-satunya wadah aspirasi bagi umat Islam Indonesia. Sayang memang, karena Hasyim Asy’ari sudah lebih dulu wafat pada 1948, sehingga tidak sempat menyaksikan NU yang kemudian berubah “baju” menjadi partai politik karena ‘ketegangan’ dengan Masyumi ada 1952.

2. Pendidikan Nurcholish Madjid

a. Belajar di pesantren

Menurut pengakuan Cak Nur, ia pertama kali belajar agama lewat ayah dan ibunya sendiri. Kebetulan mereka berdua memang mendirikan madrasah sendiri pada tahun 1948 dan Cak Nur adalah salah seorang murid di madrasah tersebut. Selain itu, Cak Nur kecil yang mengikuti Sekolah Rakyat (SR) di kampungnya.

Setamat Sekolah Rakyat 1952, ia dimasukkan oleh ayahnya ke pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang. Namun, di Darul Ulum Cak Nur bertahan hanya dua tahun. Ada dua alasan mengapa ia hanya

Masyumi kesasar”, saya sedih sekali”, Lihat Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 161.

bertahan dua tahun “nyantri” di sana. *Pertama*, karena alasan kesehatan dan *kedua*, karena alasan ideologi atau politik.

Semenjak kecil Nurcholish Madjid adalah anak yang giat mencari ilmu. Pendidikan formalnya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah *Wathoniyah* yang didirikan oleh KH. Abdul Majdid, tak lain adalah ayahnya sendiri. Ketika masih duduk di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Nurcholish Madjid juga merangkap belajar di bangku Sekolah Dasar (SD). Dalam lembaga pendidikan dasar inilah Nurcholish Madjid dibimbing langsung oleh ayahnya.

Sikap tegas ayah Cak Nur yang tetap memilih jalur politik di Masyumi dan jalur ibadah di NU, membuat Cak Nur tak tahan untuk berlama-lama di Darul ‘Ulum. Meskipun disana Cak Nur salah seorang murid yang berprestasi, namun Cak Nur kecil tak mungkin lagi bisa betah di pesantren tersebut.

Ia meminta agar ayahnya bisa memindahkan ke sekolah lain. Kemudian pada tahun 1955, Cak Nur dipindahkan ke pesantren Darusalam Gontor. Asumsi ayahnya, Gontor merupakan pesantren Masyumi. Rupanya di Gontor Cak Nur merasa lebih cocok. Dan menurut pengakuan Cak Nur, Gontor sendiri banyak memberi bekas kepadanya. Bagi Cak Nur, gontor inilah yang memberi inspirasi kepadanya mengenai modenisme dan non sektarianisme. Pluralisme disini cukup terjaga. Para santri boleh ke NU atau Muhammadiyah. Karena suasana seperti ini, Cak Nur merasa cocok belajar di Gontor.

Sebagaimana yang kita ketahui, Pesantren Gontor memiliki semboyan; "*berpikir bebas setelah berbudi tinggi, berbadan sehat dan berpengetahuan luas*". Di sini terbentuklah iklim pendidikan yang kritis, tidak berpihak kepada salah satu mazhab, pemikiran secara fanatik dan mengajarkan kehidupan sosial yang relatif modern. Apabila diukur dengan masa sekarang, pendidikan di Gontor saat Cak Nur "*mondok*" diakhir 1950-an, pola pendidikan yang dikembangkan dapat dianggap sebagai pendidikan yang sudah *progresif*.⁷

Dan di pesantren ini pula, Cak Nur sempat menunjukkan kembali bahwa ia seorang yang pantas diperhitungkan. Ia kembali menjadi salah seorang siswa terbaik dengan meraih juara kelas, sehingga dari kelas satu ia bisa loncat ke kelas 3 SMP.

Menurut kesimpulan Greg Barton,⁸ seorang sarjana Australia yang pada 1995 melakukan penelitian tentang "Islam Liberal di Indonesia", menyebutkan bahwa Gontor adalah unsur lain yang berpengaruh terhadap perkembangan intelektual Cak Nur. Ia berumur 16 tahun saat masuk Gontor dan selesai ketika berumur 21 tahun. Tepatnya pada tahun 1960, Nurcholish Madjid menyelesaikan studinya

⁷ Di Pondok modern Gontor boleh dibilang tidak dikenal kultur pertentangan keagamaan seperti soal-soal khilafiyah yang sering mempertentangkan faham-faham keagamaan seperti soalsoal khilafiyah yang sering menimbulkan eskalasi emosi dan pertikaian di kalangan masyarakat awam, seperti NU dan Muhammadiyah tidak ada yang ngotot mempertahankan fahamnya masingmasing. Mereka adalah santri Gontor, dan beribadah menurut cara Gontor. Lebih jelas baca Marwan Saridjo, *OpCit*, hlm. 6.

⁸ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 74-75.

di Gontor dan untuk beberapa tahun ia mengajar di bekas almamaternya itu.⁹

Cak Nur mengakui bahwa selama di Gontor ia selalu meraih prestasi yang cukup baik. Dan kecerdasan Cak Nur ini rupanya di tangkap pula oleh pimpinan pesantren KH. Zarkasyi. Sehingga pada tahun 1960, ketika Cak Nur menamatkan belajarnya, sang guru bermaksud mengirim Cak Nur ke Universitas al-Azhar, Cairo. Tetapi karena di Mesir saat itu sedang terjadi krisis terusan Suez yang cukup kontroversial itu, keberangkatan Cak Nur sampai tertunda. Sambil menunggu keberangkatannya ke Mesir itulah Cak Nur memanfaatkan untuk mengajar di Gontor selama satu tahun. Namun waktu yang di tunggu-tunggu untuk berangkat ke Mesir ternyata tak kunjung tiba.

Pendidikan di Gontor inilah yang menjadikannya berfikir terbuka terhadap segala sesuatu masalah dalam kehidupannya, sehingga menghasilkan keluasaan wawasan yang menjadikan siap saat pergi ke Jakarta pada tahun 1961.

Pada semasa kanak-kanak, ia berkeinginan menjadi seorang insinyur kereta api dan mendalami fisika serta matematika, sehingga elektronika merupakan salah satu hobinya. Dan dia juga berhasrat besar mengejar karir di bidang ilmu-ilmu terapan.¹⁰

⁹ Kurikulum Gontor di tempuh untuk jangka waktu enam tahun dengan tiga tahun yang terakhir mempelajari metode pengajaran. Maka sangat lazim alumni Gontor masih menetap di pesantren paling tidak untuk satu tahun lagi untuk mengajar. Adapun kelangsungan ekonomi para guru di pesantren ini sepenuhnya ditanggung oleh pesantren, bahwa guru-guru mendapat makan dan rumah pondokan, tidak lebih. Lihat *ibid*, hlm. 75.

¹⁰ *Ibid*, hlm.74.

b. Belajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Memiliki bakat akademik yang luar biasa, Nurcholish Madjid tanpa ragu dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Tahun 1961, Nurcholish Madjid melanjutkan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, di Fakultas Adab, Jurusan Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam. Ini merupakan indikasi bahwa Nurcholish Madjid sejak awal memang memiliki kecenderungan mendalami ilmu keislaman.

Saat memegang posisi Ketua Umum PB HMI periode pertama, Cak Nur juga menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT). Pada tahun 1968-1971 Cak Nur juga menjadi Wakil sekretaris Umum dan Pendiri *International Islamic Federation of Student Organisation* (IIFSO: Himpunan Organisasi Mahasiswa Islam se-Dunia). Kemudian ia menjadi pemimpin umum majalah MIMBAR Jakarta tahun 1973-1976. Bersama teman-temannya mendirikan sekaligus menjadi direktur LSIK (Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan) tahun 1972-1976 dan seterusnya LKIS (Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi) 1974-1976.¹¹

Selama di IAIN Jakarta, Nurcholish Madjid juga menekuni dunia jurnalistik. Dimulai ketika ia menerjemahkan artikel berbahasa arab tentang fiqih umat yang dikirimnya ke majalah Gema Islam, majalah Islam pimpinan Buya Hamka. Dengan bakat ini Nurcholish

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003, hlm. 224.

Madjid mendapat perhatian khusus dari Buya Hamka.¹² Sebagai penghargaan atas kepandaian Nurcholish Madjid dalam dunia jurnalistik, Buya Hamka memberi tempat tinggal di bilik masjid al-Azhar yang dikelolanya sendiri.

Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1968, dengan karya tulis yang berjudul “*Al Qur’an, Arabiyyun Lughatan Wa Alamiyyun Ma’nan*” (Al-Qur’an secara bahasa adalah Arab, secara makna adalah Universal).

c. Kunjungan ke Barat dan Pengembaraan Intelektual

Tamat dari IAIN Jakarta Nurcholish Madjid memperoleh kesempatan melanjutkan studinya ke Chicago, pada tahun 1974. Perjalanan Nurcholish Madjid didanai oleh *Ford Foundation*. Ketika itu Fazlur Rahman dan Leonard Binder berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya, bertujuan untuk mencari peserta program seminar dan loka karya di *The University of Chicago*.¹³

Sebenarnya pada awal kedatangannya bukan Nurcholish Madjid yang dicari oleh Fazlur Rahman dan Leonard Binder, melainkan H.M Rasyidi. Tetapi atas pertimbangan usia yang terlalu tua akhirnya dibatalkan. Kemudian Leonard Binder mengambil inisiatif untuk mendorong Nurcholish Madjid mengikuti seminar dan loka karya sebagai peninjau yang diselenggarakan oleh *Univercity of Chicago*. Di

¹² Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis; Kritik Nalar Atas Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002, hlm. 56-57.

¹³ Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 30.

Universitas Chicago Nurcholish Madjid meminta kepada Leonard Binder agar ia dapat kembali lagi dengan status mahasiswa setelah penelitian berakhir. Tetapi Nurcholish harus kembali dulu ke Jakarta untuk ikut ambil bagian dalam pemilu 1977.

Maret 1978 Nurcholish Madjid kembali lagi ke Amerika untuk mengambil program Pasca Sarjana di *University of Chicago*, di sana Fazlur Rahman mengajaknya untuk mengambil penelitian di bidang kajian keislaman (di bawah bimbingannya) daripada kajian Ilmu Politik (di bawah bimbingan Leonard Binder) yang sejak awal telah direncanakan Nurcholish Madjid.¹⁴

Di Chicago, Nurcholish Madjid memperoleh gelar Doktor antara tahun 1978-1984, dengan disertasi yang berjudul *Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafah: a Problem of Reason and Revelation* (Ibnu Taymiyyah dalam Kalam dan Filsafat: antara Akal dan Wahyu dalam Islam).¹⁵

B. Karya-karya Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid dapat dikelompokkan sebagai seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang produktif. Kajian dan penelusuran terhadap karya-karya Nurcholish Madjid dianggap perlu dalam rangka mencari mata rantai gagasan dan pemikirannya, serta hubungannya dengan konsep-konsep pembaruan yang menjadi bahasan sentral tulisan ini. Dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32.

pembahasan ini, karya-karya yang dihasilkan Nurcholish Madjid, baik berupa buku, artikel atau tinjauan buku, tidak akan diungkap dan dijelaskan semua. Pembahasan hanya akan ditekankan kepada beberapa karyanya yang dianggap mewakili gagasan-gagasan sentralnya.

1. Karya Nurcholish Madjid yang telah beredar adalah sebagai berikut:

- 1) *Khazanah Intelektual Islam*.¹⁶ Karya ini menurut penulisnya dimaksudkan untuk memperkenalkan salah satu aspek kekayaan Islam dalam bidang pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan filsafat dan teologi. Dalam buku ini dibahas pemikiran al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh.
- 2) *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*.¹⁷ Dalam buku ini, yang merupakan kumpulan tulisan selama dua dasawarsa melontarkan gagasan Nurcholish Madjid tentang korelasi kemodernan, keislaman dan keindonesiaan, sebagai respon terhadap berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang di saat itu.
- 3) *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*.¹⁸ Buku ini merupakan karya monumentalnya pasca studi di Chicago. Dalam buku ini, Cak Nur berusaha mengungkapkan ajaran Islam yang menekankan sikap adil, inklusif dan kosmopolit.

¹⁶ Nurcholish Madjid, ed., *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.

- 4) Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran Nurcholish Madjid “Muda”.(1994)
- 5) Pintu-Pintu Menuju Tuhan (1994). Buku ini merupakan kumpulan sebagian besar tulisan Cak Nur di harian Pelita dan Tempo. Menurut penulisnya, buku ini merupakan penjelasan lebih sederhana dan “ringan” (populer) dari gagasan Islam inklusif dan Universal yang menjadi tema besar buku Islam Doktrin dan Peradaban.
- 6) Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah (1995). Dalam buku ini pemikiran Cak Nur lebih terarah pada makna dan implikasi penghayatan Iman terhadap perilaku sosial yang senantiasa mendatangkan dampak positif bagi kemajuan peradaban kemanusiaan.
- 7) Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (1995). Buku ini sama dengan karya monumentalnya, hanya saja, Cak Nur menyajikannya dengan wawasan yang lebih kosmopolit dan universal sekaligus mempertimbangkan aspek parsial dan kultural paham-paham keagamaan yang berkembang.
- 8) Masyarakat Religius (1997). Buku ini mengetengahkan konsep Islam tentang kemasyarakatan, antara komitmen pribadi dan komitmen sosial serta konsep tentang eskatologi.
- 9) Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam pembangunan di Indonesia (1997). Dalam buku ini Cak Nur mengetengahkan tentang peran dan

fungsi Pancasila, organisasi politik, demokratisasi, demokrasi dan konsep oposisi loyal.

- 10) Kaki Langit Peradaban Islam (1997), mengetengahkan tentang wawasan peradaban Islam, kontribusi tokoh intelektual Islam semisal Al-Shafi'i dalam bidang hukum, al-Gazali dalam bidang tasawuf, ibn Rusyd dalam filsafat dan Ibn Khaldun dalam filsafat sejarah dan sosiologi.
- 11) Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah potret Perjalanan (1997), yang membahas tentang dinamika pesantren serta kontribusinya dalam peradaban Islam di Indonesia.
- 12) Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (1997). Buku yang merupakan transkrip wawancara yang pernah dilakukan oleh Cak Nur memiliki mainstream bagaimana nilai-nilai universal dan kosmopolit Islam diaktualisasikan dalam praktik politik kontemporer.
- 13) Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat: Kolom-Kolom di Tabloid "Tekad" (1999). Dalam buku ini Cak Nur berusaha menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keterkaitan antara dimensi keislaman dengan dimensi keindonesiaan dan kemodernan sekaligus. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Cak Nur di Tabloid Tekad yang merupakan suplemen dalam harian Republika, sebuah koran harian yang diterbitkan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

14) Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi (1999). Buku ini merupakan perjalanan panjang politik Nurcholish Madjid dalam wacana perpolitikan di Indonesia. Dalam buku ini prototype negara Madinah yang telah didirikan Nabi Muhammad sedemikian ditekankan oleh Cak Nur sebagai sesuatu yang sangat cocok untuk diterapkan kini, mengingat nilai-nilainya sedemikian modern bahkan terlalu modern untuk masanya sehingga tidak bertahan lama.

15) Indonesia Kita (2003). Dalam buku yang merupakan karya tulis terakhirnya, Nurcholish Madjid berusaha memahami secara lebih luas dan mendalam tentang hakikat dan persoalan bangsa dan negara Republik Indonesia sejak dari masa lampau sampai sekarang yang menantang. Dalam buku ini dimuat pokok pemikiran Cak Nur ketika mencalonkan diri sebagai Presiden RI yang meskipun kandas melalui konvensi Partai Golkar yang terkenal dengan Sepuluh Platform Membangun Kembali Indonesia.

Pada sisi lain, ia juga banyak menulis artikel yang tersebar di beberapa buku suntingan orang lain.¹⁹ Di samping itu, terdapat beberapa ceramahnya yang juga dibukukan, seperti Perjalanan Religius Umrah dan Haji; Pesan-Pesan Takwa Nurcholis Madjid: Kumpulan Khutbah Jum'at di

¹⁹ Seperti dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, di mana Cak Nur memberikan kontribusi 17 buah entry, *Pesantren dan Tasawuf*, dalam buku suntingan M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1983, *Pengaruh Kisah Israilliyat dan orientalisme terhadap Islam*, dalam Abdurrahman Wahid, et.al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, *Akhlak dan Iman*, dalam Adi Badjuri, ed, Pelita Hati, Jakarta: Obor, 1989, *al-Quds*, dalam Wahyuni Nafis, ed., *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996, *Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah*, dalam M. Dawam Rahardjo, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.

Paramadina; 30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang tersebar di beberapa jurnal nasional²⁰ maupun jurnal internasional.²¹

2. Karya-karya dalam Bahasa Inggris

- 1) The Issue of Modernization Among Muslimin in Indonesia: From a participant's Paint of View, dalam Gloria Davies (ed.)
- 2) What is Modern Indonesia Culture? (Athens, Ohio, University of Ohio Southeast Asia Studies, 1979)
- 3) Islam in the Contemporary World, (Notre Dame, Indiana, Cross Roads Books, 1980)

3. Karir dan aktivitas intelektual Nurcholish Madjid di tingkat internasional.

- 1) Presenter, Seminar Internasional tentang "Agama Dunia dan Pluralisme", November 1992, Bellagio, Italia.
- 2) Presenter, Konferensi Internasional tentang "Agama-agama dan Perdamaian Dunia", April 1993, Wina, Austria.
- 3) Presenter, Seminar Internasional tentang "Islam di Asia Tenggara", Mei 1993, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
- 4) Presenter, Seminar Internasional tentang "Pesesuaian aliran Pemikiran Islam", Mei 1993, Teheran, Iran.

²⁰ Misalnya "Tasawuf sebagai Inti Keberagamaan" dalam Pesantren No. 3/Vol. II/1985, dan lain-lain.

²¹ Seperti "The Issue of Modernization among Muslims in Indonesia: From a Participant's Point of View", Gloria Davies, ed., What is Modern Indonesian Culture? (Athens, Ohio: University of Ohio Southeast Asia Studies, 1979); "Islam in Indonesia: Challenges and Opportunies", Cyriac K. Pullapilly, ed., Islam in The Contemporary World (Notre Dame, Indiana: Cross Roads Books, 1980).

- 5) Presenter, Seminar internasional tentang “Ekspresi-ekspresi kebudayaan tentang Pluralisme”, Jakarta 1995, Casablanca, Maroko
- 6) Presenter, seminar internasional tentang “Islam dan Masyarakat sipil”, Maret 1995, Bellagio, Italia
- 7) Presenter, seminar internasional tentang “Kebudayaan Islam di Asia Tenggara”, Juni 1995, Canberra, Australi
- 8) Presenter, seminar internasional tentang “Islam dan Masyarakat sipil”, September 1995, Melbourne, Australia
- 9) Presenter, seminar internasional tentang “Agama-agama dan Komunitas Dunia Abad ke-21,” Juni 1996, Leiden, Belanda.
- 10) Presenter, seminar internasional tentang “Hak-hak Asasi Manusia”, Juni 1996, Tokyo, Jepang
- 11) Presenter, seminar internasional tentang “Dunia Melayu”, September 1996, Kuala Lumpur, Malaysia
- 12) Presenter, seminar internasional tentang “Agama dan Masyarakat Sipil”, 1997 Kuala Lumpur
- 13) Pembicara, konferensi USINDO (United States Indonesian Society), Maret 1997, Washington, DC, Amerika Serikat
- 14) Peserta, Konferensi Internasional tentang “Agama dan Perdamaian Dunia” (Konperensi Kedua), Mei 1997, Wina, Austria
- 15) Peserta, Seminar tentang “Kebangkitan Islam”, November 1997, Universitas Emory, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat

- 16) Pembicara, Seminar tentang “Islam dan Masyarakat Sipil” November 1997, Universitas Georgetown, Washington, DC, Amerika Serikat
- 17) Pembicara, Seminar tentang “Islam dan Pluralisme”, November 1997, Universitas Washington, Seattle, Washington DC, Amerika Serikat
- 18) Sarjana Tamu dan Pembicara, Konferensi Tahunan, MESA (Asosiasi Studi tentang Timur Tengah), November 1997, San Francisco, California, Amerika Serikat
- 19) Sarjana Tamu dan Pembicara, Konferensi Tahunan AAR (American Academy of Religion) Akademi Keagamaan Amerika, November 1997, California, Amerika Serikat
- 20) Presenter, Konferensi Internasional tentang “Islam dan Hak-hak Asasi Manusia”, Oktober 1998, Jenewa, Swiss
- 21) Presenter, Konferensi Internasional tentang “Agama-agama dan Hak-hak asasi Manusia”, November 1998 State Department (Departemen Luar Negeri Amerika), Washington DC, Amerika Serikat
- 22) Peserta Presenter “Konferensi Pemimpin-pemimpin Asia”, September 1999, Brisbane, Australia
- 23) Presenter, Konferensi Internasional tentang “Islam dan Hak-hak Asasi Manusia, pesan-pesan dari Asia Tenggara”, November 1999, Ito, Jepang

24) Peserta, Sidang ke-7 Konferensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian (WCRP), November 1999, Amman, Yordania.²²

C. Kerangka Metodologis Pemikiran Nurcholish

Didalam Islam, pendekatan terhadap Al-Qur'an adalah awal untuk memaknai dan memahami apa yang menjadi pengetahuan berikutnya. Sebagai *primary resources*, Al-Qur'an tidak hanya menjadi media bagi ilmu pengetahuan tetapi juga objek ilmu pengetahuan itu sendiri. Karenanya, pemahaman awal terhadap Al-Qur'an menjadi kata kunci untuk menetapkan sebuah hukum. Apalagi kemudian didasarkan atas fakta dan ketetapan para ulama (*ijma'*) bahwa al-Qur'an menempati posisi teratas dalam hierarki sumber hukum Islam.²³

Penafsiran terhadap al-Qur'an merupakan tahapan awal yang menentukan ekspresi keberagaman seseorang. Kristen mengakui Bible dan umat Islam mengakui Qur'an. Kita menerima Al-Qur'an itu sebagai kitab suci. Karena bagaimanapun juga agama itu pada dasarnya mengandaikan hadirnya sebuah struktur masyarakat yang mengakui sebuah otoritas.

Lalu alat apakah yang bisa kita gunakan untuk mencari makna dibalik teks-teks suci tersebut? Dalam khazanah tafsir klasik persoalan ini sebenarnya sudah banyak dibahas. Namun, satu hal yang perlu dicermati bersama, bahwa

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Nurcholish_Madjid , di akses tanggal 11mei 2016 jam 10.39 WIB

²³ Imam Syafi'ie menggambarkan hierarki sumber hukum Islam dalam empat sumber yakni, alQur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Lihat Ahmad Al-Baihaqi, *Biografi Imam Syafi'i: Untold Story Imam Syafi'i & Kitab-Kitabnya*, Jakarta: Zaman, 2011, hlm. 110.

keterlibatan manusia dalam kerja-kerja penafsiran, selalu melibatkan proses penalaran. Karenanya, akan menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana akal berfungsi dalam kegiatan tafsir menafsir ini. Hal yang paling mendasar dari persoalan ini sebenarnya adalah sejauh mana kemampuan akal ketika berhadapan dengan wahyu Tuhan. Atau pada titik yang paling ekstrem bisa juga diajukan pertanyaan yang agak menggelitik, bisakah kita melawan dan mengalahkan wahyu Tuhan? Adakah misalnya batas-batas operasi akal ketika menjadi subyek penafsir kehendak Tuhan. Ataupun batasannya itu justru merupakan kebebasan tanpa batas, seperti ketika Tuhan menggambarkan burung yang sedemikian bebas terbang dan tak seorangpun bisa menghentikannya kecuali dirinya?

Sebagian besar umat Islam menilai akal sebagai satu hal yang bersifat profan, partikular dan tidak memiliki kebenaran mutlak. Sedangkan wahyu, karena diyakini sebagai “fatwa langit” sudah barang tentu memiliki kebenaran mutlak. Kurang lebih demikianlah pendapat umum yang biasa kita tangkap dari corak pemikiran keumuman umat Islam.

Pandangan ini menimbulkan implikasi terhadap agama yang hanya menjadi identitas tanpa signifikansi. Karena agama hanya dimiliki oleh individu yang otonom memiliki kebebasan dan bertanggung jawab. Dan semuanya ada dalam manusia yang berakal. Bukankah agama itu sendiri adalah *wadl`unilaahiyyun saiqun lidzawil`uqquli bi ikhtiyaarihi iyyahu ila al-sholaahi fil haalwal falaahi fil maal*. Agama hanya turun pada manusia

yang berakal dan memiliki kehendak untuk bebas memilih jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Menurut Nurcholish, ijtihad merupakan sebuah proses yang harus dilakukan secara terus menerus dari pemikiran orisinal, berlandaskan penilaian atas gejala-gejala sosial dan sejarah, yang sewaktu-waktu harus ditinjau kembali benar salahnya menurut ukuran prinsip-prinsip Islam. Karena ijtihad merupakan proses, maka sudah seharusnya umat Islam menggali kebenaran tanpa berhenti.

Namun, yang menjadi masalah adalah, selama pengamatan penulis dalam membaca karya-karya Nurcholish, dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an sangat jarang Nurcholish menampilkan sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an, padahal hal itu merupakan salah satu hal penguat sehingga apa yang disajikan Nurcholish tidak terkesan kehilangan kekayaan nuansa dalam arti konsep-konsep yang dibangunnya sendiri.

Apa yang dilakukan oleh Nurcholish adalah sebuah tindakan politik yang menginginkan agar Islam tetap dijalankan oleh umatnya. Tindakan politik itu yaitu dengan selalu menyandarkan segala sesuatu kepada teks-teks Al-Qur'an, hal ini merupakan sebuah keniscayaan.

Politik dari pengertian orang salaf, dalam pengajian KH. Dimiyati Rois, disebutkan adalah sebuah upaya untuk tetap membuat umat Islam tetap jaya dan tidak ketinggalan dari barat. Sudah sepantasnya kita tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan hadits demi jayanya Islam.

Sehingga apa yang dijelaskan secara panjang lebar di depan tentang Al-Qur'an dan kebebasan berpikir merupakan sebuah langkah politik dengan mengembalikan kembali Al-Qur'an sebagai dasar utama tanpa melupakan kebebasan berfikir yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT.

Pada dasarnya, latar belakang pemikiran Nurcholish memiliki keseimbangan antara pemikiran tradisional dan pemikiran modernis. Hal ini dikarenakan, Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh yang secara intelektual dididik dan dibesarkan dalam lingkungan tradisi keagamaan Islam yang kuat dan dunia keilmuan Barat yang kritis.²⁴

Pemikiran Nurcholish Madjid sedemikian rupa tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan rumah dan eksistensi keluarganya. Pengaruh yang paling menonjol terletak pada seorang ayah yang berperan besar dalam membentuk watak pemikiran keyakinan dan intelektualitas awal Nurcholish Madjid. Ayahnya yang pertama-tama mengajarkan, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai Qur'an dalam jiwa Nurcholish Madjid meskipun ketika itu usia Nurcholish Madjid masih enam tahun.²⁵

Pada sisi lain, ayahnya yang merupakan salah satu tokoh partai politik Islam Masyumi yang berlatar belakang tradisional dan modernis juga salah satu yang membangun dasar-dasar pemikiran Nurcholish secara politik.²⁶

²⁴ Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.* hlm. 20.

²⁶ Idris Thaha, *Demokrasi religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Bandung: Mizan, 2005, hlm. 98.

Dorongan untuk membahas masalah keharusan pembaruan pemikiran politik dan salah satunya adalah tema tentang oposisi yang telah di lontarkannya berulang-ulang. Menurut Nurcholish Madjid, merupakan sebuah keharusan mengingat pada prinsipnya dalam demokrasi yang sehat diperlukan *check and balance* yaitu adanya kekuatan pemantau dan pengimbang, sebab jika dilihat dari pandangan yang agak filosofis, manusia itu tidak mungkin selalu benar.²⁷ Sehingga perlu adanya kelompok yang legal dan formal dalam hal ini di wakili oleh partai politik untuk memantau kinerja pemerintah.

D. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Partai Oposisi

Politik praktis mulai dikenal Nurcholish saat menjadi mahasiswa. Ia terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat, tempat Nurcholish menimba ilmu di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pengalamannya bertambah saat menjadi salah satu calon Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Saat menjadi kandidat ketua umum, kemampuan Nurcholish sudah cukup komplet, (pikirannya, ngajinya, menjadi imam, khotbah, ceramah agama).

Kendati memimpin organisasi mahasiswa ekstrakurikuler yang disegani pada awal zaman Orde Baru, Nurcholish tidak menonjol di lapangan sebagai demonstran. Bahkan namanya juga tidak berkibar di lingkungan politik sebagai pengurus Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), kumpulan mahasiswa yang dianggap berperan menumbangkan Presiden

²⁷ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, artikulasi nilai islam dalam wacana sosial politik kontemporer* Jakarta: Paramadina, hlm. 6.

Sukarno dan mendudukkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai penggantinya. Prestasi Cak Nur lebih terukir dipentas pemikiran. Terutama pendapatnya tentang soal demokrasi, pluralisme, humanisme, dan keyakinannya untuk memandang *modernisasi* atau *modernisme* bukan sebagai barat, *modernisme* bukan *westernisme*. Modernisme dilihat Cak Nur sebagai gejala global, seperti halnya demokrasi.

Pemikiran Nurcholish tersebar melalui berbagai tulisannya yang dimuat secara berkala di tabloid Mimbar Demokrasi, yang diterbitkan HMI. Gagasan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara ini memukau banyak orang, hingga Nurcholish digelari oleh orang-orang Masyumi sebagai “Natsir muda”. “Gelar Natsir muda itu bukan karena dia pintar agama, melainkan karena pemikiran-pemikirannya.

Pemikiran Nurcholish yang paling menggegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, adalah saat pemimpin umum majalah Mimbar Jakarta ini melontarkan pernyataan “Islam yes, partai Islam no”. Nurcholish ketika itu menganggap partai-partai Islam sudah menjadi “Tuhan” baru bagi orang-orang Islam. Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar.

Bahkan, bagi kalangan NU, haram memilih Partai Masyumi. Padahal orang Islam tersebar di mana-mana, termasuk di partai milik penguasa Orde Baru, Golkar. Pada waktu itu sedang tumbuh obsesi persatuan Islam. Kalau tidak bersatu, Islam menjadi lemah. Cak Nur menawarkan tradisi baru bahwa

dalam semangat demokrasi tidak harus bersatu dalam organisasi karena keyakinan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu kebangsaan.

Karena gagasannya ini, tuduhan negatif datang ke arah Nurcholish, mulai dari pemikir aktivis gerakan Islam sampai peneliti asing. Di dalam negeri, pemikiran Nurcholish ditentang tokoh Masyumi, Profesor H.M. Rasjidi. Sedangkan dari negeri Jiran, Malaysia, ia dicerca oleh Muhammad Kamal Hassan, penulis disertasi yang kemudian diterbitkan dengan judul *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia*. Hassan menuding Nurcholish sebagai anggota Operasi Khusus (Opsus) di bawah Ali Moertopo.

Kejutan berikut datang lagi pada Pemilu 1977, dalam pertemuan di kantor Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), saat para aktivisnya sedang cenderung memilih Golkar sebagai kendaraan politik. Nurcholish satu-satunya tokoh yang meminta agar mahasiswa tidak memilih Golkar. "Sebab, waktu itu, menurut Cak Nur, Golkar sudah memiliki segalanya, militer, birokrasi, dan uang," kata Utomo. Maka, dalam kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurcholish mengemukakan teori "memompa ban kempes", yaitu pemikiran agar mahasiswa memilih partai saja ketimbang Golkar. Cak Nur percaya bahwa sudah saatnya partai oposisi untuk menunjukkan eksistensinya yaitu sebagai *check and balances* dan mengajak mahasiswa agar tidak memilih Golkar, dan kenyataannya ada pengaruhnya, di Jakarta PPP menang. Dengan tema demokrasinya itu, orang menjadi lebih berani, sehingga Golkar di Jakarta terus-terusan kalah.

Pemikiran politik Nurcholish semakin memasuki ranah filsafat setelah ia kuliah di Universitas Chicago, di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, untuk meraih gelar doktor dalam bidang filsafat. Nurcholish terlibat perdebatan segitiga yang seru dengan Amien Rais dan Mohamad Roem. Pemicunya adalah tulisan Amien Rais di majalah Panji Masyarakat, “Tidak Ada Negara Islam”, yang menggulirkan kegiatan surat-menyurat antara Nurcholish yang berada di Amerika dan Roem di Indonesia. Cak Nur menyatakan tidak ada ajaran Islam yang secara qoth’i (jelas) untuk membentuk negara Islam. Surat-surat pribadi itu ternyata tak hanya dibaca Roem, tetapi juga menyebar ke tokoh lain, misalnya Ridwan Saidi.

Di kalangan alumni HMI, Nurcholish sangat berpengaruh. Misalnya, saat Korps Alumni HMI (KAHMI) akhirnya menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan harus menemui Presiden Soeharto di Istana, Nurcholish “diculik” kawan-kawan HMI-nya untuk menghadap Presiden. “Karena ada orang yang berusaha tidak mengikutkannya. Tapi ada yang menyatakan dia harus ikut. Sebab, kalau Cak Nur datang, pertemuan menjadi cukup kuat.”²⁸

Pertemuan Nurcholish dengan Soeharto terakhir, pada Mei 1998, menunjukkan besarnya pengaruh Cak Nur. Saat itu Nurcholish berbicara langsung kepada Soeharto memintanya mundur.²⁹ Itulah sebabnya setiap berbicara tentang Islam di Indonesia, nama Cak Nur pasti ikut dibicarakan. Cak Nur bukan hanya sebagai tokoh pemicu pembaharuan pemikiran Islam

²⁸ <http://www.EnsiklopediTokohIndonesia.com> All right reserved. Penerbit Pt Asasia Design and Maintenance by Esero. Copy right © 2002-2009.

²⁹ Nurcholish Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama Dan Berbangsa di Masa Transisi*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 108.

yang memancing polemik di tingkat elite intelektual Islam, tapi Cak Nur perlahan tapi pasti telah menjelma menjadi teks atau *discourse* pembaharuan itu sendiri.

Partai oposisi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak Soekarno memperbolehkannya berdiri partai politik dengan demokrasi terpimpinnya tetapi partai oposisi pada saat itu belum berani untuk menunjukkan eksistensinya apalagi di zaman orde baru. Partai di luar pemerintahan masih di anggap sebagai partai yang mengancam kedaulatan pemerintah yang berkuasa saat itu.

Sementara itu menurut Nurcholis Madjid dalam bukunya “Dialog Keterbukaan” menyatakan bahwa dalam Negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan *check and balance* sebagai kekuatan pemantau dan penyeimbang, sebab dalam pandangan filosofis manusia tak mungkin selalu benar untuk menjalankan *check and balance* secara formal di parlemen dan pemerintahan. Menurutnya juga, oposisi tidak berarti *to oppose* (menentang) tapi dalam oposisi terkandung unsur *to support* (mendukung). Dalam pandangan Nurcholis oposisi sangat berbeda dengan *oppositionalisme* adalah menentang sekedar menentang, sangat subyektif dan bahkan itikadnya kurang baik, seperti kebiasaan mendaftarkan kesalahan orang lain. Sedangkan oposisi dalam semangat loyal, loyal kepada Negara, loyal kepada cita-cita bersama dan bahkan kepada pemerintah pun dalam hal yang jelas-jelas baik harus loyal.³⁰

³⁰ Nurcholish Madjid, *Op.Cit*, hlm. 7.

Menurut pemikiran Nurcholish Madjid jelas bahwa partai oposisi dalam perannya hanya sebatas menyeimbangkan pemerintah karena dalam hakekatnya manusia tidaklah luput dari khilaf, sehingga peran partai oposisi atau partai diluar pemerintahan sangat berpengaruh sebagai pengingat apabila pemerintah salah menjalankan kewajibannya dan salah dalam implementasi agenda untuk mensejahterakah rakyatnya.

Walaupun partai oposisi tidak terlalu ikut campur dalam urusan untuk mengambil keputusan di pemerintahan, tetapi kedudukannya sangat kuat jika partai oposisi yang menguasai parlemen lebih banyak daripada partai yang sedang berkuasa. Kondisi ini justru menguntungkan bagi pihak oposisi dalam ikut serta untuk melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, mengingat bahwa setiap Undang-undang yang akan disahkan haruslah melalui persetujuan dari anggota parlemen.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
TENTANG PARTAI OPOSISI

A. Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Oposisi Ditinjau Dari Perspektif Islam

Pergerakan pemuda Indonesia memang tak luput dari gejolak ambisi untuk merubah dan mengganti suasana yang suram, gelap serta memilukan. Khususnya para mahasiswa yang terus berjuang tanpa henti melakukan gerakan-gerakan revolusioner dari awal masa kemerdekaan hingga saat ini. Perlawanan terhadap rezim-rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru yang penuh dengan halangan dan rintangan, bahkan nyawa sekalipun.

Sejarah mencatat pada Juni 1966 sampai Maret 1967 mahasiswa Indonesiaberada di garis depan dalam kampanye melawan presiden Soekarno yang masih berkuasa. Dengan dukungan yang kuat dari divisi Siliwangi, mahasiswa Indonesia memimpin perjuangan “angkatan 66” salah satunya di Bandung terhadap Soekarno, kepala negara yang kekuasaannya mulai pudar. Sikap yang terlalu hati-hati dan mederat dari yang terakhir ini tak luput dari kritik mahasiswaIndonesia.¹

Serangan terhadap Soekarno dilakukan melalui tulisan-tulisan dan juga lewat aksi-aksi melalui Badan Kerjasama Pers dan Kesatuan Aksi. Organisasi ini, didirikan tak lama setelah mahasiswa Indonesialahir, terdiri dari kasatuan aksi dan koran-koran Bandung. Langkah yang harus diambil

¹Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia pembentukan dan konsolidasiOrBa 1966-1974* diterjemahkan oleh Nasir Tamara, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 46.

pers agar dapat mencapai cita-cita Orde Baru dengan cara lebih baik didiskusikan secara teratur di bawah pimpinan Rahman Tolleng. Mahasiswa Indonesiaberhasil memperkuat lobi Orde Baru berkat dukungan pers daerah dalam tingkatan lokal (Jawa Barat) dengan menyelenggarakan satu kampanye terhadap Soekarno. Kampanye yang mereka lakukan dalam koran itu sendiri berlangsung melalui beberapa tahap yang makin lama makin memperlihatkan sikap lebih keras.

MPRS juga melakukan sidang paripurna untuk mengesahkan berbagai tindakan yang memperlemah kedudukan Soekarno. Sementara jalan-jalan raya di ibukota dan Bandung diduduki berbagai gerakan pemuda, atas namanya atau atas nama-nama kesatuan aksi, Mahasiswa Indonesiamenyerang kewibawaan dan politik presiden: “Cabut keputusan MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945”, ‘Jabatan presiden seumur hidup inkonstitusional’. Bahwa Soekarno adalah pencipta Pancasila dipertanyakan.

Kampanye anti Soekarno baru tampil secara terang-terangan pada tanggal 17 Agustus 1966. Pada hari itu Soekarno mengucapkan sebuah pidato berjudul “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” yang terkenal dengan singkatan “Jas Merah”. Dalam pidato ini Soekarno mengkritik keputusan-keputusan yang diambil MPRS dan menganggap bahwa Surat Perintah 11 Maret tidaklah berarti pengalihan kekuasaan, tapi hanya pengalihan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk memelihara keamanan.

Pidato yang dianggap sebagai provokasi ini melahirkan reaksi keras. Di Bandung misalnya, pidato itu dianggap sebagai biang keladi keributan tanggal 19 Agustus 1966 ketika sekelompok orang bersenjata dan berseragam hitam yang dijuluki gerombolan liar Gestapu ASU menyerang Markas Besar KAMI dan KAPPI sehingga Julius Usman, mahasiswa Universitas Katolik Parahiyangan tersebut, meninggal dunia, dan limabelas orang lainnya menderita luka-luka. Deklarasi KAMI diterbitkan: “Bung Karno tak dipercayai lagi, sabotase terhadap program Kabinet Ampera”.

Pada bulan September serangan terhadap Soekarno diteruskan dengan menggunakan fakta-fakta yang didapat dari proses pengusutan Jusuf Muda. Mantan Menteri Bank Sentral ini dituduh telah memberikan dana negara kepada Presiden untuk membiayai sejumlah aksi politiknya. Mahasiswa Indonesia melangkah lebih jauh dan menulis di halaman pertama: “BK harus ke Mahmilub, terlibat subversi dan beri angin Gestapu”. Soekarno juga dianggap sebagai “Benteng pertahanan terakhir Orde Lama”. Bahkan Mahasiswa Indonesiamenyatakan bahwa Soekarno “Terlibat dalam kudeta Gestapu/PKI”.²

Kampanye anti Soekarno memasuki fase terakhir. Dalam pasal pertama Tritura yang baru diumumkan, menuntut supaya ‘arsitek Orde Lama’ dipecat. Tanggal 29 Januari 1966, berbagai defile dilancarkan oleh kesatuan aksi di Bandung. Mahasiswa Indonesiamengutip salah satu slogan yang dibawa demonstran: “Meskipun langit runtuh kami menuntut Soekarno

²*Ibid*, hlm.49.

diadili”. Tanggal 5 Februari 1966, koran Bandung itu menuntut “agar Soekarno ditahan bila perlu untuk pemeriksaan”. Mahasiswa Indonesiamengumumkan bahwa DPRGR setelah menambah anggotanya sebanyak 108 orang telah mensahkan satu resolusi yang meminta MPRS mengakhiri tugas Soekarno dan mengajukannya ke pengadilan.

Kejadian-kejadian berlangsung dengan cepat. Menurut Rosihan Anwar: “tanggal 10 sampai 13 Februari 1966 para panglima ke empat Angkatan Bersenjata berunding secara maraton dengan Presiden untuk meyakinkannya menerima salah satu dari usul yang diajukan”. Perundingan itu gagal karena Soekarno menolak untuk menyerah. Dengan demikian hanya pilihan pertama yang dapat diambil.

Penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto terjadi tanggal 20 Februari. Namun kesatuan aksi di Jawa Barat tidaklah puas, sebab Soekarno masih menggondol gelar Presiden. Rosihan Anwar mengkritik dipertahankannya Soekarno sebagai Presiden karena meskipun tanpa kekuasaan, ia akan dapat memulihkan kembali kekuasaannya *a fortiori* bila ia tak diadili.

Pada dasarnya Soekarno adalah seorang yang selalu mencoba untuk mempertahankan diri, meski tampak dengan jelas gejala bahwa ia sudah tidak mampu lagi mengerahkan dukungan rakyat, dengan rasa penuh keyakinan ia berusaha untuk meyakinkan rakyat bahwa ia masih tetap berkuasa dan tidak dapat dipaksa-paksa oleh siapa pun juga. Oleh sebab itu, Soekarno mencoba untuk memenuhi “Tritura” yang kemudian dituntut oleh mahasiswa dan

masyarakat lainnya, akan tetapi Soekarno malah menyerang dan menantang tuntutan dan aksi mereka.

Ini juga kesalahan Soekarno yang tidak mau berusaha untuk mengendalikan gerakan mahasiswa dengan membujuk atau setidaknya pura-pura berpikir setuju kepada kekuatan yang terus menerus berdemonstrasi. Tetapi dalam kenyataannya Presiden justru malah menyerang balik demonstran sambil mengejek mereka dengan sepetah peribahasa Belanda secara terbuka dalam salah satu pidatonya: "*kip zonderkop*" yang artinya "ayam tanpa kepala". Tetapi, kemudian ternyata bahwa ayam tanpa kepala itu akhirnya memiliki kepala, dan malah semakin berani. Sehingga membuat Soekarno tidak aman berada di Jakarta, dengan kemudian menuduh mahasiswa dipersenjatai dan ditunggangi oleh militer. Semakin kuatnya tekanan dan merasa terdesak, militer pun mendesak dengan paksa pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani Supersemar sebagai surat perintah kekuasaan yang diberikan kepada Jenderal Soeharto untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan.³ Kelicikan Soekarno kemudian dibalas oleh militer yang saat itu memiliki banyak dukungan dengan memaksa presiden menandatangani Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).

Menyusul naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, seluruh oposisi hancur. Dengan dibubarkannya PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya, tidak ada lagi organisasi berbasis massa yang kritis terhadap pemerintahan

³Eros Djarot, *Siapa Sebenarnya Soeharto, fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*, Jakarta: Mediakita, 2006, hlm. 53.

yang didominasi militer ini. Kelompok kelas menengah Muslim maupun yang lebih berorientasi sekular mendukung apa yang dinamakan Orde Baru, seperti juga banyak aktivis mahasiswa. Tetapi, segera menjadi jelas bahwa kelompok komunis bukanlah satu-satunya kelompok yang mendapatkan derita dari pemerintah yang baru. Sejak para pemimpin baru mencoba mengontrol seluruh masyarakat dan mencegah berkembangnya setiap bentuk organisasi independen, banyak aktivis kelas menengah menjadi sadar dan mulai mengkritik rezim. Sejak tahun 1970 hingga Januari 1972, protes-protes dialamatkan pada tindak korupsi, khususnya yang terjadi di dalam perusahaan minyak milik negara, Pertamina. Proyek Taman Mini Indonesia yang disponsori oleh istri Presiden merupakan target berikutnya. Pada Januari 1972, pemerintah menindas protes-protes tersebut dengan menangkap para pemimpin mahasiswa maupun editor surat kabar.

Banyak aktivis kelas menengah mengambil pendekatan yang lebih moderat dan kurang konfrontatif. Mereka mendirikan LSM-LSM yang menangani isu-isu pembangunan, perempuan, lingkungan, dan sebagainya. Disebabkan profil politik mereka yang rendah, mereka berusaha meloloskan diri dari bentuk-bentuk penindasan yang lebih agar bisa melanjutkan upaya advokasi mereka. Aktivis-aktivis mahasiswa yang lebih radikal tidak puas dengan pendekatan moderat LSM-LSM itu. Pada tahun 1974, satu generasi baru aktivis mahasiswa menggalang demonstrasi untuk memprotes kebijaksanaan pembangunan pemerintah dan dominasi modal Jepang di Indonesia. Mereka dipengaruhi oleh teori kemandirian dan barangkali juga

oleh demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di Thailand, yang mengakibatkan berakhirnya rezim militer di sana pada Oktober 1973. Protes mahasiswa ini kelihatannya didukung oleh unsur-unsur militer. Pemimpin mahasiswa Hariman Siregar mengakui mengantongi dukungan dari sejumlah pengusaha Indonesia. Menyusul demonstrasi dan kerusuhan 15 Januari 1974 (Insiden Malari), beberapa pemimpin mahasiswa, di antaranya Hariman Siregar dipenjarakan.

Pada tahun 1977 dan 1978, lagi-lagi mahasiswa berdemonstrasi menentang rezim Orde Baru. Sekalipun demokrasi dan hak asasi manusia bukan merupakan konsep kunci gerakan mahasiswa ini yang memfokuskan pada kritik terhadap kebijakan pembangunan dan militerisme. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an terjadi pula kerusuhan buruh. Gelombang pemogokan melanda wilayah perindustrian di Jakarta, tetapi setelah adanya intervensi militer frekuensinya menurun tajam. Perjuangan buruh waktu itu tidak erat terkait dengan protes-protes mahasiswa dan kelas menengah lainnya.⁴

Rezim Orde Baru telah memperlihatkan kecenderungan untuk mengasingkan beberapa mantan pendukungnya. Banyak pejabat tinggi dan politisi menjadi kecewa terhadap pemerintahan Soeharto. Beberapa telah disingkirkan dari kekuasaan karena perselisihan pribadi dengan Soeharto atau karena Soeharto percaya bahwa mereka melangkah terlalu jauh dalam menggapai ambisi politik mereka sendiri. Perselisihan kadang-kadang terkait

⁴Anders Uhlin, *Oposisi Berserak*, diterjemahkan dari *Indonesian and the "Third wave of Democratization": the Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World* oleh Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 91.

dengan politik kekuasaan murni pada tingkat elite, tetapi terdapat pula pertengkarannya mendasar dalam masalah kebijakan.

Banyak aktor elite yang kecewa memilih untuk bungkam, tetapi sebagian dari mereka membentuk sejenis oposisi. Mereka biasanya disisihkan dari kehidupan elite dan mengalami hantaman pada bisnis mereka dan pembatasan pada kebebasan mereka berekspresi dan hak mereka untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Sebagian kecil berakhir di penjara, tetapi biasanya mereka tidak dikenai jenis penindasan kejam yang sama dengan orang-orang dari strata sosial rendah.

Para pembangkang elite yang paling aktif dan terpendang adalah mereka yang dikaitkan dengan Petisi 50.⁵ Sejak 1980 kelompok ini telah menulis lebih dari 170 surat kepada parlemen, pemerintah, dan lain-lain, guna menyerukan reformasi politik. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh kelompok ini tidak lebih dari koreksi terhadap kritik-kritik mengenai pelaksanaan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Dengan pengertian lain, kelompok petisi 50 itu menginginkan agar konstitusi dijalankan dengan jujur dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen.⁶

Pernyataan mereka pada bulan Mei 1980, menggugat penguasa Orde Baru yang dianggap telah menyalahgunakan angkatan bersenjata (ABRI) dengan mengatakan bahwa serangan terhadap dirinya berarti merupakan

⁵Petisi 50 adalah kelompok yang terdiri atas lima puluh orang, mulai dari politisi, birokrat, pensiunan jenderal, para pengusaha, intelektual, maupun para dai. Lihat Thohir Luth, *M. Natsir: dakwah dan pemikirannya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999, hlm. 170.

⁶*Ibid*

serangan terhadap Pancasila. Argumen dasar mereka adalah bahwa Soeharto sendirilah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Anggota-anggota Petisi 50 adalah antikomunis yang teguh, tetapi mereka sering menekankan kebutuhan akan kesetaraan ekonomi dan sebagian dari tuntutan reformasi politik dan ekonomi mereka memiliki karakteristik demokratis sosial.

Pada April 1991, unsur-unsur elite intelektual membentuk kelompok prodemokrasi demokrat lain, Forum Demokrasi. Empat puluh lima intelektual terkemuka mendirikan forum ini, sebagian sebagai reaksi atas dibredelnya tabloid *Monitor* yang didakwa mencemarkan Islam ketika menerbitkan sebuah jajak pendapat umum yang di dalamnya Nabi Muhammad ada di urutan sebelas. Serangan massa yang tidak pernah dihukum terhadap majalah itu dan penangkapan atas editornya mengguncang minoritas non-muslim, dan memperlihatkan pada mereka bahwa kecenderungan Islam fundamentalis masih ada di Indonesia. Para pendiri forum juga diilhami oleh tulisan dan aktifitas Valvac Havel di Cekoslovakia.⁷

Mengingat kekacauan yang terjadi di era orde lama, Cak Nur selalu menegaskan pentingnya suatu partai oposisi dalam pemerintahan yang berkuasa karena bukan tidak mungkin pelaksanaan kebijakan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan, sehingga partai oposisi disini sebagai lembaga yang legal dan formal hendaknya dapat

⁷*Ibid*, hlm. 96.

mengawasi kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan awal mereka yang baik.

Inilah yang menjadikan Cak Nur mengungkapkan gagasan tentang partai oposisi itu perlu dalam suatu demokrasi yang modern, karena pemerintah dengan kelemahannya sebagai manusia tidaklah luput dari khilaf dan salah. Tapi ketika pemimpin itu dzalim terhadap rakyatnya pun kita sebagai umat Islam harus tetap tunduk dan mengikuti apa yang telah menjadi ketetapan pemerintah atau pemimpin bangsa ini.

Islam dalam sejarahnya memang tidak mengenal adanya suatu partai politik maupun partai oposisi, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam Islam sebenarnya mempunyai pandangan sendiri tentang adanya kelompok atau partai yang berada di luar pemerintahan atau partai yang selalu menentang keberadaan pemerintah yang sedang berkuasa.

Walaupun tidak ada dalil aqli maupun naqli yang menjelaskan keberadaan dan sikap bagaimana partai atau kelompok yang berada dalam Al-Qur'an namun penulis melihat ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman dalam beroposisi yang baik.

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ آلَ حَزَابٍ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿١١٠﴾

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu

tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan”(QS.33:22)⁸

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿٣٨﴾

“Suatu tentara yang besar yang berada disana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan” (QS. 38:11)⁹

Dalil tentang *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan dalil utama yang di tegakan untuk selalu berupaya mengkritik pemerintah yang berkuasa, karena di dalamnya terkandung makna yang sangat luas. Pun demikian dengan kondisi yang ada pada saat ini, sering kita temui adanya pemerintah yang sewenang-wenang dengan rakyatnya. Sehingga sebagai umat muslim tentulah wajib dalam menegakan kebaikan walaupun hanya dengan lisanya sekalipun.

Di Indonesia sendiri pernah terjadi revolusi di tahun 1998 dengan berakhirnya rezim orde baru, ini menunjukkan bahwa kekuatan rakyat sebenarnya masih dapat di andalkan ketika pemimpin yang berkuasa sudah tidak lagi pro dengan rakyat atau terlibat banyak kasus seperti korupsi dll. Walaupun saat itu terdapat kelompok yang sudah terorganisir seperti partai, namun tidaklah besar pengaruhnya terhadap pemerintah.

Nurcholish Madjid, pria kelahiran Jombang Jawa Timur ini pun hanya mampu melakukan kritik terhadap pemerintah melalui dialog-dialog dan ceramahnya.

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1978, hlm. 818.

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1978, hlm. 891.

Partai oposisi menurut Nurcholish Madjid hanya sebatas *check and balance*, apabila dalam kaitannya pemerintah itu dzalim atau menyeleweng sebagai warga negara yang baik kita harus tetap loyal terhadap pemerintah yang berkuasa.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْمَعُوا الطَّاعَةَ
 ُ عَلَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَسْمَعُوا لَطَاعَةَ

Ibn umar r.a berkata : nabi saw bersabda “*seorang muslim wajib mendengar dan ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah maksiat. Maka apabila disuruh ma’siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta’at.*”¹⁰

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa kepatuhan seorang rakyat terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib ta’at dan patuh dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh, bahkan boleh memberontak atau melawan. Dalam hadis di atas, batasan-batasan kepatuhan terhadap pemimpin itu adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat.

Ada juga hadits lain juga terdapat hak dan kewajiban sebagai pemimpin maupun rakyat seperti dalam hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ
 لِأَحْزَرَ مِيعَنًا أَبِيهَا قَالَ سَأَلَ سَلْمَةَ بْنَ يَزِيدٍ الْجَعْفَرِيَّ سَوْلاً لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَارِ أَيُّنَا نَقَامُ عَدَا
 يْنَا أَمْ رَأَيْسَالُو نَاحِقَهُمْو يَمْنَعُو نَاحِقَنَا فَمَا تَأْمُرُ نَافَاً عَرَضَعْنَهُمْ سَأَلَهَا عَرَضَعْنَهُمْ سَأَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي
 يَالثَّانِيَةِ فَجَدَّبَهَا لِأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُوا وَأَطِيعُوا أَفَانَمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا أَوْ عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلْتُمْو حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 رِبْنَابَيْشِيَّةٌ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُو قَالَ فَجَدَّبَهَا لِأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَقَالَ سَوْلاً لِلَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُوا وَأَطِيعُوا أَفَانَمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا أَوْ عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۝

¹⁰Abu Zakaria Yahya, *Riyadhus shalihin Imam An-Nawawi*, Jakarta:Shahih, 2016, hlm. 484.

Abu hunaidah (wa'il) bin hadjur r.a. Berkata "*salamah bin jazid alджу'fy bertanya kepada rasulullah saw : ya rasulullah, bagaimana jika terangkat diatas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat? Pada mulanya rasulullah mengabaikan pertanyaan itu, hingga ditanya kedua kalinya, maka rasulullah saw bersabda : dengarlah dan ta'atlah maka sungguh bagi masingmasing kewajiban sendiri-sendiri atas mereka ada tanggung jawab dan atas kamu tanggung jawabmu.*"¹¹

Rakyat memiliki hak dan pemimpin memiliki tanggung jaab. Begitu pula sebaliknya, rakyat memiliki tanggung jawab dan pemimpin juga memiliki hak. Antara keduanya harus ada keseimbangan dan kesetaraan. Yang satu tidak boleh mendominasi yang lain. Akan tetapi kekuasaan sepenuhnya adalah tetap berada di tangan rakyat. Karena hakekat kepemimpinan hanyalah amanat yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Bila sang pemimpin tidak bisa menjaga amanat itu dengan baik, maka kekuasaan kembali berada di tangan rakyat.

Tentu ini memang baik jika dilihat dari perpektif Islam di Indonesia yang mayoritas Ahlusnnah yang merupakan kelompok ber cirikan sabar dalam berposisi, karena porsi kita sebagai warga negara haruslah mengakui pemimpin, baik itu pemimpin yang dzalim atau yang memang membawa masyarakatnya menjadi kekehidupan yang lebih baik. Karena berdasarkan hadits di atas jelas karena yang penting bagi aliran ini adalah taat kepada pemimpin sehingga kelaliman pemimpin adalah mutlak dengan Allah. Sehingga ketaatan kepada pemimpin di pandang lebih mulia ketimbang melakukan revolusi atau semacamnya.

¹¹*Ibid*, hlm. 487.

Berbeda dengan jika kita melihat dari buku Dr. Neveen, dari berbagai aliran yang ada, penulis menganalisa bahwa apakah implikasinya jika pemimpin itu terus berbuat dzalim dan menimbulkan kesengsaraan terhadap masyarakatnya sedangkan kita harus tetap loyal terhadap pemimpin seperti itu? Hal inilah yang sangat memerlukan pertimbangan, di satu sisi kita harus mematuhi pemimpin sesuai dengan hadits baginda Rasul dan disisi lain kita menyaksikan bahwa semakin banyak masyarakat yang sengsara akibat kebijakan pemimpin tersebut. Jelas bahwa kita memang harus mematuhi pemimpin apapun alasannya tetapi kita juga berhak menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang telah tertulis jelas dalam Al-Qur'an.

Penulis berpendapat bahwa gagasan yang di lontarkan oleh Nurcholish Madjid bahwa sebagai partai oposisi yang mempunyai kedudukan konstitusional haruslah tetap loyal kepada pemerintah, menurut penulis gagasan tersebut haruslah dengan syarat pemerintah itu masih bertindak sesuai dengan syari'at dan tidak menimbulkan kesengsaraan terhadap rakyat yang di pimpinnya. Karena pemimpin (kepala negara) dalam persepektif Islam merupakan wakil dari umat atau lebih tepatnya pegawai umat. Di antara hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang dikehendaki, terutama jika orang yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukannya¹² dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyatnya sebaiknya dilakukanlah revolusi terhapa

¹² Mashudi, Mei 2014, *REFORMULASI HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA: Dialog Pemikiran Yusuf al-Qardhawy dengan Ulama Klasik tentang Politik Kenegaraan dan Implikasinya bagi Perpolitikan di Indonesia*, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, hlm. 214, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/265/246>, 21 Juni 2016.

pemerintah yang sedang berkuasa tersebut. Mengingat dampak dari kebijakan pemerintah yang zalim lebih buruk daripada dilakukannya sebuah revolusi untuk mengganti pemimpin yang baru.

B. Analisis Peran Dan Kedudukan Partai Oposisi Dalam Pemerintahan Yang Sah Menurut Nurcholish Madjid

Oposisi bukanlah bentuk penentang sejati yang dalam Islam sering dikaitkan dengan istilah *bughat* atau pemberontak, melainkan di era yang modern sekarang oposisi merupakan suatu kelompok atau partai yang dapat berjalan beriringan dengan pemerintah untuk sekedar memberikan kritik dan saran apabila pemerintah yang berkuasa melakukan kesalahan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Karena partai yang kalah dalam pemilu hendaknya tetap memberikan kontribusinya untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam buku “Dialog keterbukaan (artikulasi nilai Islam dalam wacana sosial politik kontemporer)”, Cak Nur menyatakan bahwa partai oposisi merupakan wujud modern dari ide demokrasi. Beliau menjelaskan bahwa oposisi adalah suatu kenyataan dalam demokrasi karena apabila kelompok oposisi tidak diakui, nantinya mengakibatkan saling curiga dan malah melihat kelompok oposisi sebagai suatu ancaman.¹³

Disini Cak Nur mencoba menerangkan bahwa kelompok oposisi tidak mendapatkan pengakuan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri. Padahal kenyataannya menurut Cak Nur, bahwa partai yang kalah atau tidak masuk dalam pemerintah secara otomatis merupakan partai oposisi.

¹³Nurcholish Madjid, *Op.Cit*, hlm. 7.

Karena hakekatnya yang dimaksud partai oposisi adalah partai yang berada diluar pemerintahan.

Di era orde baru partai yang berada di luar pemerintahan adalah PPP dan PDI, mereka sebenarnya adalah partai oposisi tetapi mereka enggan menyebut dirinya sebagai partai oposisi. Ini dikarenakan sejarah kelam bangsa Indonesia di tahun 1965-1966. Bahwa saat itu revolusi terjadi sangat brutal dan membabi buta saling serang antara partai komunis indonesia dengan partai yang berada di luar pemerintahan. Sehingga mengakibatkan trauma untuk sebagian orang maupun Cak Nur.¹⁴

Padahal jika dilihat dari maknanya oposisi tidaklah seburuk yang mereka pikirkan, karena pada dasarnya partai oposisi hanya bertugas memantau kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah di canangkan. Maka seharusnya PPP dan PDI yang saat itu merupakan partai legal dan formal hendaknya mendapatkan dukungan penuh dari mahasiswa dan pemuda,¹⁵ mengingat Golkar dengan *single majority* nya dukungan dari birokrasinya sudah pasti memenangkan pemilu berikutnya.

Hendaknya partai yang berada di luar pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah partai oposisi karena kedudukan mereka yang berada di luar itu adalah oposisi. Seperti yang terjadi di era orde baru, PPP dan PDI yang hanya menjadi pelengkap penderita karena tidak jelasnya kedudukan mereka alias canggung. Disebut partai oposisi tidak, disebut partai pemerintah juga tidak karena tidak ikut memerintah sehingga peran kedua

¹⁴*Ibid*, hlm. 17.

¹⁵*Ibid*, hlm. 6.

partai ini tidak berfungsi sama sekali. Sementara Golkar selalu menyatakan *single majority*. Kalau ada mayoritas, berarti ada minoritas dan minoritas itu adalah oposisi.¹⁶

Diawal kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla partai yang kalah dalam pemilu yang menguasai kursi Dewan lebih banyak daripada partai pemerintah. Ini membuktikan bahwa kelompok oposisi sebenarnya mempunyai peran yang besar dalam membuat kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia kalau mereka secara berani memposisikan diri sebagai partai yang bertugas pengimbang dan pengawas. Walaupun Indonesia menggunakan sistem presidensial namun dalam pelaksanaannya, komposisi kekuatan antara presiden dan seluruh anggota dewan adalah sama, sehingga untuk membuat undang-undang presiden terlebih dahulu meminta persetujuan dari mayoritas anggota dewan yaitu DPR.

Dengan dikuasainya Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai oposisi, hal ini mengakibatkan partai oposisi mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Karena dulu partai oposisi hanya di anggap partai yang kalah dalam pemilu dan tidak dapat turut serta dalam pembuatan kebijakan sehingga membuat kedudukannya menjadi canggung dan tidak berfungsi, tetapi dalam demokrasi sekarang ini partai oposisi sangat jelas perannya. Berbeda dengan zaman orde baru dulu, partai oposisi masih di anggap sebagai ancaman bagi kedaulatan negara. Walaupun pada akhirnya beberapa partai politik merubah acuan ikut dalam koalisi pemerintah, setidaknya

¹⁶*Ibid*, hlm. 54.

diawal pemerintahan, partai oposisi sudah mampu menunjukkan eksistensinya dan perannya walaupun sebagai partai yang kalah dalam pemilu tetapi masih mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan.

Dalam politik demokrasi, oposisi sebagai sikap, gerakan, dan tatanan kelembagaan dapat dilihat dari berbagai dimensinya. *Pertama*, oposisi sebagai sarana disensus karena kekuasaan menjadi hampa tanpa ketidakkuasaan masyarakat. *Kedua*, oposisi menjadi sarana kelembagaan bagi partisipasi demokrasi di masyarakat. Dan *ketiga*, oposisi adalah mekanisme pilihan sebagai upaya mendewasakan warga negara dan pejabat public dalam memilih yang terbaik bagi penyelenggaraan kekuasaan. Namun demikian, seringkali muncul kekhawatiran bahwa kata “oposisi” menimbulkan trauma politik seperti pada tahun 1950-an. Oposisi atau beroposisiterhadap pemerintah dibayangkan dengan sebuah sikap yang tidak bersahabat, apriori yang konotasinya adalah sikap permusuhan dengan obsesi menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Di samping itu, Demokrasi Pancasila dipergunakan sebagai demokrasi yang tidak memberi tempat bagi lembaga oposisi. Oleh karenanya, Nurcholish Madjid memberikan pandangan bahwa oposisi merupakan gerakan yang harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga pasca era Orde Baru.¹⁷

¹⁷Nurcholish Madjid, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokrasi*, Jakarta: Voice Centre Indonesia. 2000, hlm. 5-6.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat ada dua point penting yang menjadi inti dari bahasan pemikiran Nurcholish Madjid tentang konsep partai oposisi:

1. Konsep partai oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid dalam prespektif Islam adalah Oposisi Loyal yang mempunyai artri mengontrol, mengawasi, mengkritik, dan bahkan mempunyai arti *to support dan check and balance* yaitu mampu mendukung para penguasa untuk mampu menjalankan pemerintahan dengan baik serta dapat menjadi pengawas dan pengimbang. Sedangkan dalam pandangan Islam oposisi yang dilakukan partai politik merupakan sebuah keharusan karena partai adalah sebuah golongan atau *Ummah* yang mempunyai kapasitas serta basis kekuatan masa yang mendukungnya, sehingga dengan itu partai yang beroposisi tidak mudah untuk dipatahkan oleh tipu daya serta pemaksaan para penguasa. Jika dilihat dari sejarah peradaban Islam, melakukan revolusi itu juga menjadi suatu keharusan ketika pemimpin itu sudah tidak adil atau sudah terlalu banyak membawa kemudharatan bagi rakyatnya.
2. Kedudukan dan peran partai oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid terhadap pemerintahan di Indonesia adalah partai yang kalah atau

tidak masuk dalam pemerintah secara otomatis merupakan partai oposisi. Karena hakekatnya yang dimaksud partai oposisi adalah partai yang berada diluar pemerintahan karena oposisi bukanlah bentuk penentang sejati yang dalam Islam sering di kaitkan dengan istilah *bughat* atau pemberontak, melainkan di era yang modern sekarang oposisi merupakan suatu kelompok atau partai yang dapat berjalan beriringan dengan pemerintah untuk sekedar memberikan kritik dan saran apabila pemerintah yang berkuasa melakukan kesalahan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kelompok oposisi sebenarnya mempunyai peran sebagai partai yang bertugas pengimbang dan pengawas.

B. Saran

Menjadi golongan oposisi mungkin bukan hal yang mudah, langkah dan perbuatan selalu dicurigai, menuai kontroversi serta tak sedikit hujatan yang terdengar oleh mereka yang beroposisi. Namun demikian dibalik itu Allah menjanjikan sebuah keberkahan dan karunia bagi yang menjalankannya.

Dengan adanya partai oposisi diharapkan agar mampu mengontrol berjalannya pemerintahan, sehingga tidak terjerumus kepada penyelewengan kekuasaan. Karena seperti kata adagium “kekuasaan condong pada penyelewengan dan kekuasaan yang absolut akan berakibat pada penyelewengan yang merajalela”. Dan diharapkan juga agar partai oposisi mampu memberikan alternatif kebijakan yang membangun sehingga dapat

terwujud sebuah pemerintahan yang berkeadilan dan mampu mensejahterakan warga negaranya.

Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa sebagai partai oposisi hendaknya mereka melakukan revolusi dengan syarat bahwa pemerintah yang sudah berkuasa melakukan ke dzaliman yang masif sehingga dengan revolusi dapat mengembalikan keadaan dimana para pemimpin itu dapat berlaku adil dan sesuai syari'at Islam. Karena partai oposisi merupakan kelompok yang legal dan konstitusional sehingga kelompok mereka lah yang berhak secara formal melakukan tindakan-tindakan pengawasan dan pengimbangan bila perlu dengan jalan revolusi.

C. Penutup

Syukur al-Hamdulillah penulis panjatkan kehadiran Illahi Rabbii, hanya dengan hidayah dan 'inayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini. Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari 125 kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan tegur sapa dari berbagai pihak untuk kiranya sudi memberikan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang penulis paparkan dalam coretan singkat ini dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan diskursus dalam pemikiran hukum politik Islam menjadi lebih bervariasi. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Abdullah Aziz, “Studi Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang sekularisasi politik” Skripsi Siyasah Jinayah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2012, td.
- Abdul Khalik, Neveen, *Al-Mu’aradhah fi Fikr al-siyasi al-Islami*, Terj. Oposisi Islam, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Al-Baihaqi, Ahmad, *Biografi Imam Syafi’i: Untold Story Imam Syafi’i & Kitab-Kitabnya*, Jakarta: Zaman, 2011.
- Al-Bugha, Mustafa Dib, *Al- Wafi: Syarah Hadits arbain Imam An-Nawawi*, terj. *Al-Wafi fi Syarh Hadits Al-Arbain Imam An-Nawawiyyah*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1999.
- Cipto, Bambang, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Djamaluddin Malik, Dedy dan Ibrahim, Idi Subandy, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung : Zaman Wana Mulia, 1998.
- Djarot, Eros, *Siapa Sebenarnya Soeharto, fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*, Jakarta, Mediakita, 2006.
- Fachruddin, Fuad, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman ilmu jaya, 1988.
- Hari Cahyono, Cheppy, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur’an Per Kata*, Jakarta: Maghfirah, 2011.
- Huda, Misbahul, “Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Demokrasi” Skripsi Siyasah Jinayah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2013, td.

- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. oleh M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, 1996.
- Hidayat, Komaruddin, "Kata Pengantar", Dalam Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Idrus, Junaidi, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- IAIN Syarif Hidayatullah, PUSLIT, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Jami, Akhmad, "Menggagas Oposisi Loyal terhadap Pemerintah menurut Dr. Nurcholish Madjid (Mencari format Oposisi Ke Indonesiaan perspektif Fiqh Siyasah)" Skripsi Siyasah Jinayah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2012, td.
- Lidle, R. William, *Islam, Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Luth, Thohir, *M. Natsir: dakwah dan pemikirannya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Madjid, Nurcholis, *Atas Nama Pengalaman Beragama Dan Berbangsa di Masa Transisi*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- _____, *Dialog Keterbukaan, artikulasi nilai islam dalam wacana sosial politik kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- _____, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- _____, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- _____, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokrasi*, Jakarta: Voice Centre Indonesia. 2000.
- Mashudi, Mei 2014, *Journal REFORMULASI HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA: Dialog Pemikiran Yusuf al-Qardhawiy dengan Ulama Klasik tentang Politik Kenegaraan dan Implikasinya bagi Perpolitikan di Indonesia*, Walisongo, Volume 22, Nomor 1

- Mc Gill, Jhon dan Soetrisno, Eddy, *Kamus Politik*, Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1996.
- Mubarok, Jaih, *Fikih Siyasah: Studi tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Raco, J.R, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Raharjo, M. Dawam (ed.), *Pesantren dan pembaharuan*, Jakarta : LP3ES, 1998.
- Raillon, Francois, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia pembentukan dan konsolidasi OrBa 1966-1974* diterjemahkan oleh Nasir Tamara, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Ridwan, Nur Khalik, *Pluralisme Borjuis; Kritik Nalar Atas Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Saifullah Fatah, Eep, *Membangun Oposisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur: Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia tetap Berjilbab*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Schmid, J.J. Van, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1980.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sufyanto, *Elaborasi Posisi masyarakat Madani Nurcholish Madjid: Tinjauan Hermeneutika Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Sumarno dan Yeni R, Lukiswara, *Pengantar Study Ilmu Politik*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1992.
- Suseno, Magnis dkk, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Suseno, Franz Magnis, Islam dan Modernitas, dalam *Mengkaji Ulang Pembaharuan Pemikiran Islam: Respon dan Kritik terhadap Gagasan Nurcholish Madjid*, Jakarta: paramadina, 1993.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2005.

Tim Penyusun Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Uhlen, Anders, *Oposisi Berserak*, diterjemahkan dari *Indonesian and the "Third wave of Democratization": the Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World* oleh Rofik Suhud, Bandung, Mizan, 1998.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 "Tentang Partai Politik", Yogyakarta, 2003.

Wahyuni Nafis, Muhammad, "Kata Pengantar", *Dalam Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

www.ashlf.com Aries Sugi Hartono, oposisi semu di Indonesia, diakses pada tgl 9 maret 2016.

www.EnsiklopediTokohIndonesia.com, di akses tanggal 11 mei 2016.

www.fisipunsil.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-negara.html?m=1, di akses pada tanggal 1 Februari 2016.

www.id.wikipedia.org/wiki/Nurcholish_Madjid, di akses tanggal 11 Mei 2016.

www.kamusbesar.com/28854/partai, di akses tanggal 31 Maret 2016.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1978.

Zakaria Yahya, Abu, *Riyadhus shalihin Imam An-Nawawi*, Jakarta: Shahih, 2016.

Zamharir, Muhammad, *Agama dan Negara, Analisis Kritis pemikiran politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: Murai Kencana, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faizal

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 25 Maret 1992

Alamat Asal : Ds. Jatirokeh, Kec. Songgom Kabupaten Brebes

Pendidikan : - SD Negeri 01 Jatirokeh Lulus tahun 2004

- SMP 03 Negeri Jatibarang Lulus Tahun 2007

- SMA Negeri 01 Jatibarang Lulus Tahun 2010

- Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ahmad Faizal